

KATALOG: 4102004.3514
ISSN 2807-5250

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN PASURUAN

Volume 8, 2025

2025



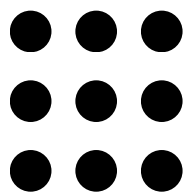
**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PASURUAN**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN PASURUAN

Volume 8, 2025

2025



<https://pasuruankab.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PASURUAN**



Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasuruan 2025

Nomor Publikasi : 35140.25038
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xii + 77 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan

Diterbitkan oleh :
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan

Sumber Ilustrasi : storyset.com; freepik.com; flaticon.com, canva.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan



Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasuruan 2025

Pengarah

Yeni Setyowati, S.Si, M.Si

Kordinator Teknis

Achmad Fariyanto, S.Si

Penyunting

Achmad Fariyanto, S.Si

Penulis

Achmad Fariyanto, S.Si, Rahmat Hermawan, SST, dan Afina Latifa, S.Tr.Stat.

Pengolah Data

Achmad Fariyanto, S.Si dan Rahmat Hermawan, SST

Desain Sampul dan Infografis

Rahmat Hermawan, SST

Layout

Rahmat Hermawan, SST dan Afina Latifa, S.Tr.Stat.



Kata Pengantar

Pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menjalankan program pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu. Agar program tersebut bisa berjalan sesuai yang direncanakan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap sejumlah indikator yang mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat.

Kami berharap semoga dengan kehadiran publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pengguna data, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melakukan evaluasi program pembangunan kesejahteraan rakyat.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan indikator kesejahteraan rakyat dan semoga kehadiran publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data secara luas.

Pasuruan, Desember 2025



Yeni Setyowati S.Si, M.Si

Plt. Kepala BPS Kabupaten Pasuruan



Daftar Isi

Bab 1 Latar Belakang dan Ruang Lingkup	3
Bab 2 Kependudukan	7
Bab 3 Kesehatan	15
Bab 4 Fertilitas dan Keluarga Berencana	25
Bab 5 Pendidikan	31
Bab 6 Ketenagakerjaan	43
Bab 7 Pola Konsumsi dan Pengeluaran	51
Bab 8 Perumahan	57
Bab 9 Kemiskinan	65
Bab 10 Sosial Lainnya	73

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan, Tahun 2023 - 2025 (ribu jiwa)	8
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pasuruan, Tahun 2025	9
Tabel 2.3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasuruan, Tahun 2023-2025 (jiwa per km ²)	10
Tabel 3.1 Angka Kesakitan Kabupaten Pasuruan, Tahun 2024 - 2025 (persen)	18
Tabel 3.2 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Pasuruan, 2024 - 2025 (persen)	19
Tabel 3.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun di Kabupaten Pasuruan Menurut Tempat Melahirkan Terakhir Selama 2 Tahun Terakhir, 2025 (persen)	20
Tabel 4.1 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun di Kabupaten Pasuruan Menurut Status Perkawinan, 2025	25
Tabel 4.2 Wanita Berumur 10 Tahun Keatas yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Pasuruan, 2025	26
Tabel 4.3 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Kabupaten Pasuruan, 2023 - 2024	27
Tabel 5.1 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Sekolah di Kabupaten Pasuruan, 2025	36
Tabel 5.2 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Sekolah di Kabupaten Pasuruan, 2023-2024	37
Tabel 5.3 Rasio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pasuruan, 2024-2025	40
Tabel 5.4 Rasio Guru Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pasuruan, 2022-2023	40
Tabel 6.1 Penduduk Kabupaten Pasuruan Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, 2021-2025	44
Tabel 6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2024-2025	46

Daftar Tabel

Tabel 6.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha,, Tahun 2024-2025 (jiwa)	47
Tabel 7.1 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan, 2024-2025	52
Tabel 8.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Pasuruan, 2024-2025	58
Tabel 8.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Fasilitas Perumahan di Kabupaten Pasuruan, 2024-2025	59
Tabel 9.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan, 2020-2025	65
Tabel 9.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pasuruan, 2020-2025	68
Tabel 10.1 Persentase Penduduk 5 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi di Kabupaten Pasuruan, 2024-2025	73
Tabel 10.2 Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha Menurut Jenis Kredit Usaha di Kabupaten Pasuruan, 2025	75
Tabel 10.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima di Kabupaten Pasuruan, 2025	76

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan, Tahun 2025 (ribu jiwa)	8
Gambar 2.2 Rasio Jenis Kelamin menurut Umur di Kabupaten Pasuruan, Tahun 2025 (Persen)	10
Gambar 3.1 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pasuruan dan Provinsi Jawa Timur, Tahun 2020-2025	16
Gambar 3.2 Persentase Penduduk Kabupaten Pasuruan Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir tetapi Tidak Rawat Jalan, 2025	18
Gambar 3.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun di Kabupaten Pasuruan Menurut Penolong Persalinan, 2025	20
Gambar 5.1 Persentase Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Pasuruan, 2025	32
Gambar 5.2 Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Pasuruan, 2020 - 2025	33
Gambar 5.3 Persentase Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di Kabupaten Pasuruan, 2025	34
Gambar 5.4 Persentase Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Pasuruan menurut Jenis Kelamin, 2025	35
Gambar 6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Pasuruan (persen), 2021-2025	44
Gambar 6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Timur , 2025 (persen)	45
Gambar 6.3 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Status Usaha, Tahun 2025	48
Gambar 7.1 Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita Sebulan di Kabupaten Pasuruan, 2021 - 2025	53
Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Pasuruan, 2025	60
Gambar 9.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2025	67

TOSARI
Sanja Desa

SIER
Danareksa





BAB 1

Latar Belakang dan Ruang Lingkup

Sejahtera pada idealnya dapat diartikan sebagai kondisi dimana masyarakat di suatu wilayah dapat hidup dengan makmur, nyaman, sehat, dan berkecukupan. Semakin sejahtera suatu wilayah, maka semakin baik kualitas hidup di wilayah tersebut. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan kemampuan dari setiap individu serta dorongan dari pemerintah yang ada.

Kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan dengan melakukan pembangunan yang merata. Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus melakukan pembangunan yang lebih baik dari waktu ke waktu untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan dilakukan untuk mewujudkan derajat kehidupan yang lebih sehat, layak, dan manusiawi.

Pembangunan tanpa pengukuran hasil hanya akan menjadi agenda rutinan dan menjadi tidak berarti. Perencana pembangunan dan pengambil kebijakan daerah perlu mengetahui hasil dari pembangunan yang telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan yang telah dicapai. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap berbagai kinerja pembangunan, agar kebijakan yang akan diambil pada masa mendatang dapat mencapai sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum sekaligus menjadi contoh bagi pembangunan di wilayah lain.

Evaluasi terhadap hasil pembangunan dapat dilakukan dengan melihat indikator kesejahteraan rakyat, sebagai sasaran dari berbagai program pembangunan. Apabila indikator yang ada menunjukkan kesejahteraan rakyat meningkat, maka dapat diasumsikan bahwa kinerja pembangunan relatif sudah mencapai sasaran yang dituju, demikian pula sebaliknya. Indikator kesejahteraan rakyat yang dimaksud dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pengangguran, kondisi perumahan, dan sebagainya.

Kesejahteraan rakyat memiliki dimensi yang sangat luas, sementara data yang tersedia masih terbatas, sehingga tidak semua aspek yang mendukung kesejahteraan rakyat dibahas dalam publikasi ini. Aspek-aspek kesejahteraan yang akan diulas adalah aspek kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendapatan, perumahan, dan aspek lainnya.

Tujuan Penulisan

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasuruan tahun 2025 ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran tentang perkembangan kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan sosial, sebagai dampak pembangunan yang telah dilakukan.
2. Menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk perencanaan pembangunan selanjutnya.

Jenis dan Sumber Data

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 menyajikan informasi dalam bentuk ulasan, tabel-tabel, dan gambar. Pada setiap bab disertakan ulasan, sehingga dapat diperoleh gambaran informasi yang terkait dengan topik bahasan pada bab yang bersangkutan. Sumber data utama penulisan ini berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Sensus Penduduk, serta data penunjang lainnya yang berasal dari survei dan sumber data lainnya.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Kegiatan Susenas secara nasional dilakukan setiap tahun. Survei ini mengumpulkan data yang mencakup berbagai aspek sosial dan ekonomi, seperti kependudukan, kesehatan, fertilitas, pengeluaran rumah tangga, kriminalitas dan perumahan serta lingkungan. Karakteristik penting kependudukan seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, hubungan anggota rumah tangga dengan kepala rumah tangga dan pendidikan dikumpulkan melalui pertanyaan data pokok (kor) setiap tahun. Data yang lebih rinci, seperti konsumsi rumah tangga, perumahan, kesehatan, dan sosial budaya dikumpulkan melalui data sasaran (modul) yang dikumpulkan secara periodik.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengumpulan data yang secara nasional dilakukan setiap tahun. Survei ini merupakan kegiatan pengumpulan data yang mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti jumlah orang yang masuk dalam angkatan kerja, jumlah orang yang bekerja, jumlah orang yang mencari kerja, dan sebagainya.

Sensus Penduduk

Sensus penduduk merupakan kegiatan nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan data tentang penduduk dan rumah tangga di seluruh Indonesia. Sensus penduduk dilakukan secara berkala setiap 10 tahun sekali, biasanya di tahun yang berakhiran 0, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Sensus Penduduk mencakup semua orang yang berada di wilayah geografis Indonesia pada saat pencacahan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (kecuali korps diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia, maupun para tuna wisma yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

Sistem Penulisan Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasuruan disajikan dalam sistematika sebagai berikut :

- Bab I menyajikan tentang Latar Belakang dan Ruang Lingkup
- Bab II menyajikan tentang Kependudukan
- Bab III menyajikan tentang Kesehatan
- Bab IV menyajikan tentang Fertilitas dan Keluarga Berencana
- Bab V menyajikan tentang Pendidikan
- Bab VI menyajikan tentang Ketenagakerjaan
- Bab VII menyajikan tentang Pola Konsumsi dan Pengeluaran
- Bab VIII menyajikan tentang Perumahan
- Bab IX menyajikan tentang Kemiskinan
- Bab X menyajikan tentang Sosial Lainnya

KEPENDUDUKAN

Jumlah Penduduk
Kabupaten Pasuruan
Tahun 2025

1,67 juta jiwa

Persentase Penduduk

Laki-laki
50,01%

Perempuan
49,99%

64+ tahun
8.4%

0-14 tahun
21.5%

Persentase
Penduduk
Menurut
Kelompok
Umur

15-64 tahun
70.1%





Bab 2 Kependudukan

Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Artinya, penduduk merupakan pelaku dan penggerak pembangunan. Disisi lain, hasil dari pembangunan harus mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Karena hakikat dari pembangunan adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari pemerataan kesejahteraan rakyatnya. Dalam mekanisme perencanaan pembangunan, penduduk dilihat sebagai salah satu faktor strategis karena disadari posisi mereka bukan hanya sebagai sasaran tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Jumlah, Komposisi Penduduk, Rasio Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk

Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah jumlah penduduk yang besar. Bila dilihat pada tabel 2.1, jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 berdasarkan hasil Proyeksi penduduk tahun 2025-2035 tercatat sebanyak 1,67 juta jiwa mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan sebesar 1,66 juta jiwa. Dalam kurun waktu satu tahun jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan telah mengalami penambahan penduduk sebesar 12,2 ribu jiwa.

Tabel 2.1

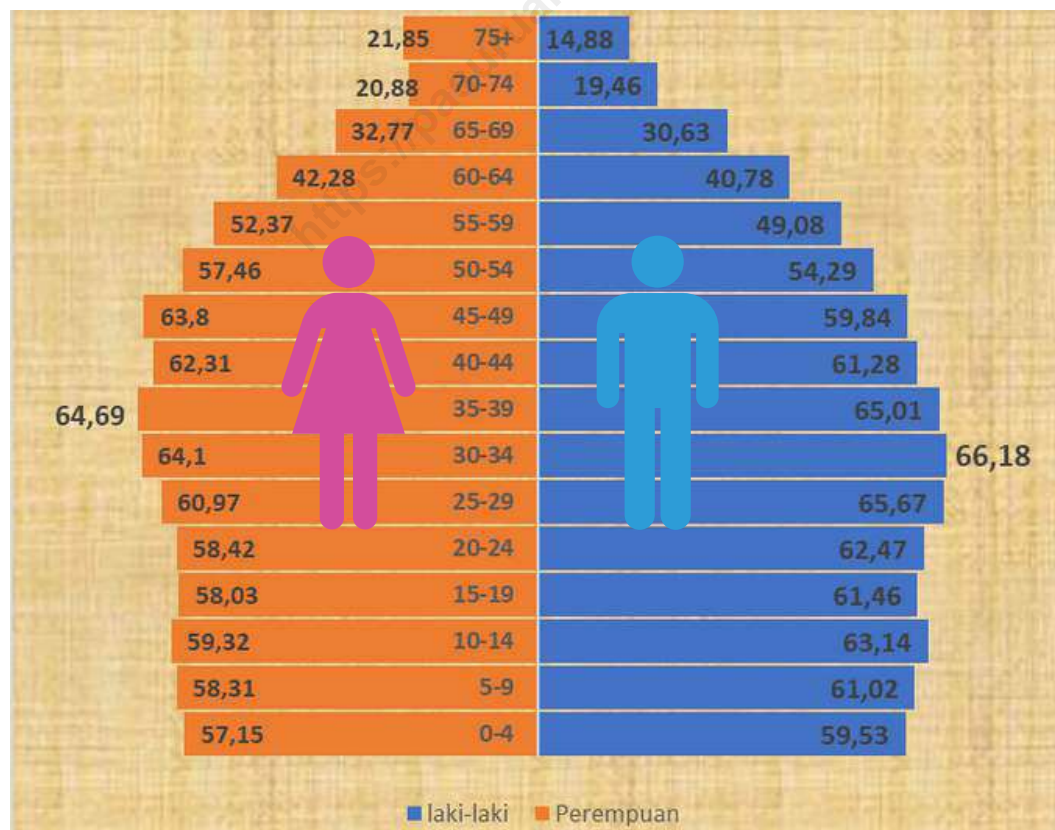
Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan, Tahun 2023 - 2025 (ribu jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk
(1)	(2)
2023	1.644,5
2024	1.657,2
2025	1.669,4

Sumber : Publikasi Penduduk Kab/Kota Provinsi Jawa Timur 2020-2035

Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk dapat dilihat melalui jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang mendiami suatu wilayah. Jika melihat komposisi penduduk menurut kelompok umur, salah satu indikator yang umum digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan adalah angka rasio ketergantungan. Sementara komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat diketahui menurut indikator rasio jenis kelamin. Indikator ini digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu. Perubahan penduduk menurut kelompok umur dapat mempengaruhi angka rasio ketergantungan. Angka rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif lagi (65 tahun keatas) dan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Tinggi rendahnya rasio ketergantungan juga memengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.



Sumber : Publikasi Penduduk Kab/Kota Provinsi Jawa Timur 2020-2035

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan, Tahun 2025 (Ribuan Jiwa)

Dari piramida penduduk di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Pasuruan lebih banyak dihuni oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 1,17 juta jiwa atau sebesar 70,11 persen dari total penduduknya. Persentase penduduk muda yang belum memasuki usia produktif (0-14 tahun) sebesar 21,47 persen dan penduduk tua yang tidak produktif lagi (lebih dari 64 tahun) sebesar 8,41 persen. Jika dihitung rasio ketergantungannya, Kabupaten Pasuruan memiliki nilai sebesar 31,34 persen, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung beban sebanyak 31 sampai 32 penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Angka ketergantungan yang mulai mendekati angka 50 harus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah harus mulai mempersiapkan fasilitas-fasilitas penunjang saat penduduk usia produktif memasuki masa-masa tidak produktif lagi. Seperti fasilitas kesehatan dan perlindungan sosial untuk penduduk tersebut. Agar penduduk yang melewati transisi tersebut tidak membawa beban yang ditanggung di masa sebelumnya ke masa yang baru. Selain itu, perlu diperhatikan juga pemenuhan fasilitas untuk penduduk yang belum produktif ke penduduk produktif. Karena penduduk yang belum produktif memerlukan sekolah dan penambahan keterampilan untuk mampu bertahan dan berkelanjutan saat harus menanggung beban di masa produktifnya.

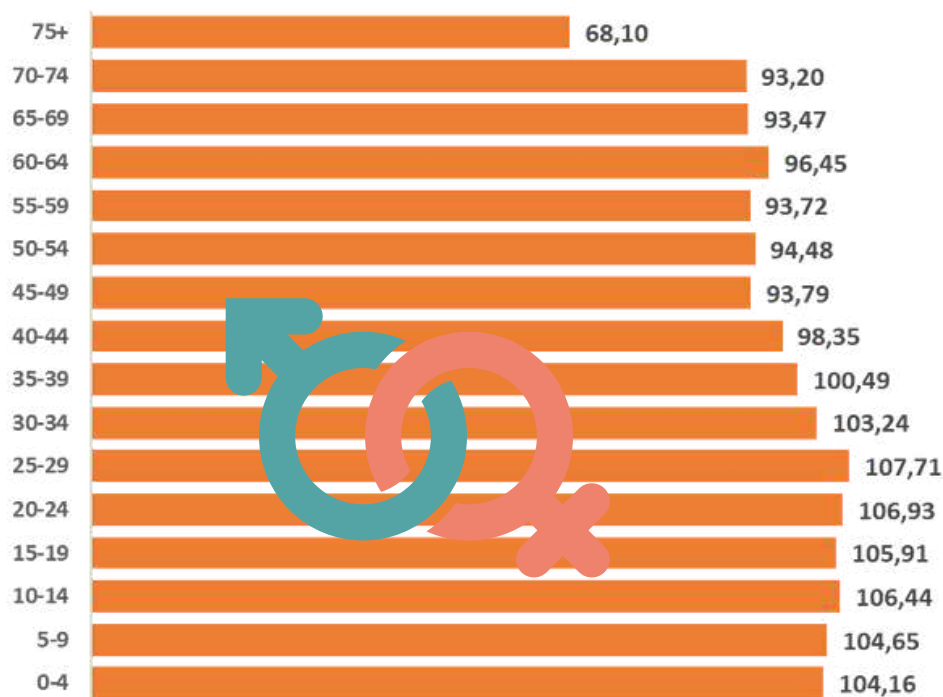
Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pasuruan, Tahun 2025

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	834,72	50,01
Perempuan	834,68	49,99
Jumlah	1.669,40	100,00

Sumber : Publikasi Penduduk Kab/Kota Provinsi Jawa Timur 2020-2035

Nilai rasio jenis kelamin di Kabupaten Pasuruan adalah 100,04. Angka ini mengartikan bahwa dalam suatu komunitas terdapat 100 sampai 101 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan atau dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki hampir sama dengan jumlah penduduk perempuan. Pada tahun 2025, persentase penduduk laki-laki di Kabupaten Pasuruan adalah 50,01 persen sementara penduduk perempuan sebanyak 49,99 persen.



Sumber : Publikasi Penduduk Kab/Kota Provinsi Jawa Timur 2020-2035

Gambar 2.2 Rasio Jenis Kelamin menurut Umur Kabupaten Pasuruan, Tahun 2025

Jika rasio jenis kelamin dilihat menurut kelompok umur, terdapat delapan kelompok umur yang rasio jenis kelaminnya di bawah 100, yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki di kelompok umur tersebut. Delapan kelompok umur tersebut berada di kelompok umur tidak lagi produktif (65+ tahun) dan kelompok umur 40-64 tahun. Sementara selain kelompok umur tersebut memiliki nilai rasio jenis kelamin di atas 100 persen.

Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Pertumbuhan penduduk mengakibatkan bertambah padatnya Kabupaten Pasuruan di tiap tahunnya. Padatnya pemukiman ini merupakan implikasi dari bertambahnya jumlah penduduk namun luas wilayahnya tetap. Semakin padat suatu wilayah tentunya semakin menuntut perhatian yang lebih oleh semua pihak. Semakin tinggi kepadatan penduduk, maka semakin sulit pula untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh penduduk, terutama perumahan karena luas lahan kosong/tidak terbangun menjadi semakin terbatas dari tahun ke tahun.

Tabel 2.3

Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasuruan, Tahun 2023 - 2025 (jiwa per km²)

Tahun	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)
2023	1.101
2024	1.110
2025	1.118

Sumber : Publikasi Penduduk Kab/Kota Provinsi Jawa Timur 2020-2035

Kepadatan penduduk di Kabupaten Pasuruan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk walaupun semakin tahun pertumbuhannya semakin melandai. Pada tahun 2025, kepadatan penduduk Kabupaten Pasuruan adalah sebesar 1.118 jiwa per km² , nilai tersebut merupakan peningkatan sebesar 8 jiwa per km² dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepadatan yang sudah mencapai titik jenuh, mungkin akan lebih banyak memberi dampak negatif dan menciptakan banyak persoalan terkait dengan ketimpangan alokasi sumber daya manusia. Permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, kriminalitas, berkurangnya lahan pertanian produktif, dan kerusakan lingkungan akan semakin meningkat jika tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti penyediaan sarana dan fasilitas sosial ekonomi serta penciptaan kesempatan bekerja yang berkelanjutan. Persebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian terkait dengan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang antarwilayah kecamatan. Beberapa pemicu tingkat persebaran penduduk yang tidak merata adalah faktor geografis wilayah, perbedaan pola fertilitas dan mortalitas, faktor migrasi, ketersediaan infrastruktur, ketersediaan kesempatan kerja dan kemudahan akses tenaga kerja, serta kebijakan pembangunan antarwilayah yang tidak merata.

<https://pasuruankab.bps.go.id>

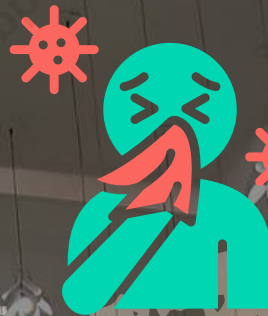
KESEHATAN



Umur Harapan Hidup
Tahun 2025

74,81 

8,64 



Angka
Kesakitan
Tahun
2025



15,23%

Persentase
Penduduk yang
Berobat Jalan
ke Rumah Sakit





Bab 3 Kesehatan

Kesehatan merupakan hal mendasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia dalam beraktivitas. Tanpa Kesehatan yang baik, manusia akan sulit untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. *World Health Organization (WHO)* mendefinisikan Kesehatan sebagai suatu keadaan sehat yang utuh baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Penduduk yang sehat secara fisik diharapkan juga baik dari sisi kualitas, terutama untuk kiprah dalam pembangunan, turut mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tidak berlebihan jika diungkapkan bahwa Kesehatan merupakan investasi utama serta pilar penting dalam agenda pembangunan bangsa.

Pada tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang akan menghiasi wajah pembangunan dunia hingga tahun 2030 nanti, seluruh isu mengenai Kesehatan tertuang dalam butir tujuan ketiga, yakni menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh seluruh penduduk pada semua usia. Pembangunan sektor Kesehatan seluruh penduduk pada semua usia. Pembangunan sektor Kesehatan untuk SDGs sangat tergantung pada peran aktif seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah maupun sektor swasta.

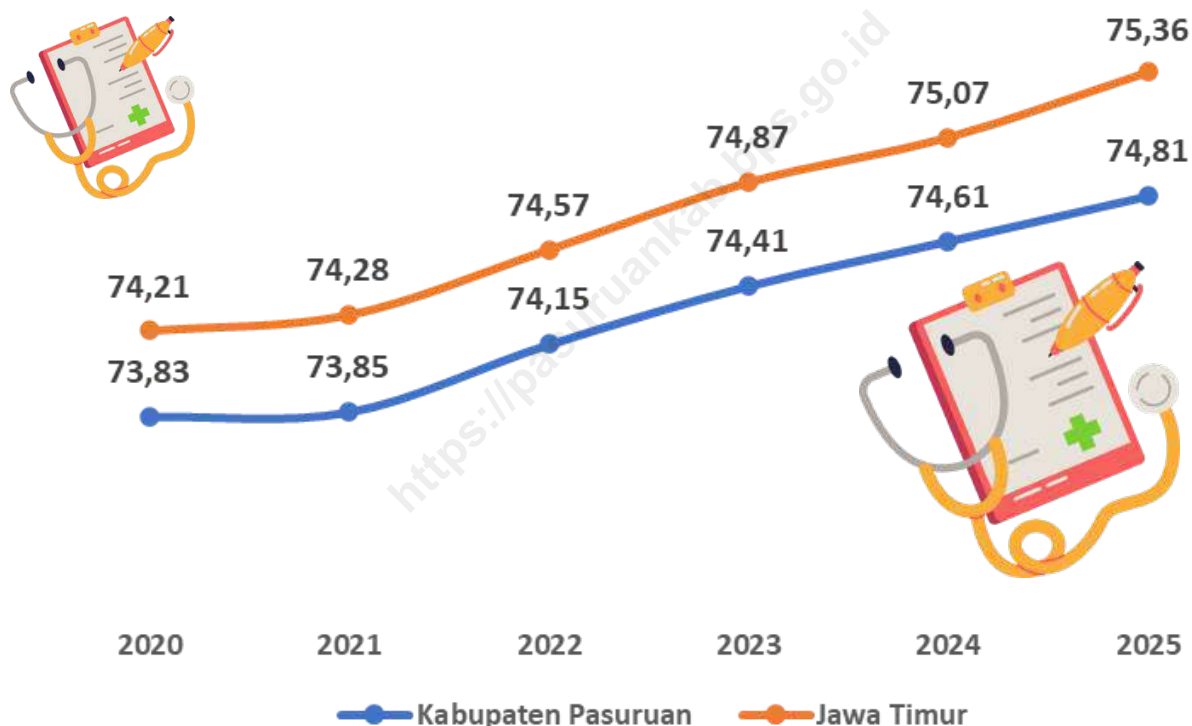
Jadi, tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah menjadi lebih baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, indikator yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

Indikator Kesehatan Penduduk

Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesehatan penduduk adalah umur harapan hidup (UHH). Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu wilayah. Meningkatnya pelayanan kesehatan melalui puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat diharapkan mampu meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 3.1 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pasuruan dan Provinsi Jawa Timur, Tahun 2020-2025

Umur Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata lama hidup seseorang, yang dihitung berdasarkan pola kematian populasi pada tahun tertentu. Konsep ini menunjukkan bahwa bayi yang lahir pada suatu tahun diperkirakan akan mencapai usia rata-rata tertentu jika pola kematian saat itu tetap berlaku. Naiknya Umur Harapan Hidup menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup penduduk. Rendahnya Umur Harapan Hidup di suatu daerah menjadi indikator kritis yang harus direspons dengan program pembangunan kesehatan yang komprehensif.

Secara metodologi, perhitungan Umur Harapan Hidup idealnya didasarkan pada Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang bersumber dari data registrasi kematian yang lengkap dan berkelanjutan. Namun, mengingat sistem registrasi penduduk di Indonesia yang belum berjalan optimal, perhitungan Umur Harapan Hidup seringkali harus dilakukan dengan metode tidak langsung, misalnya menggunakan perangkat lunak statistik demografi seperti Mortpak Lite.

di Kabupaten Pasuruan selama 2020 – 2025 menunjukkan trend meningkat yaitu dari 74,21 (2020) menjadi 75,36 (2025). Pada tahun 2020, umur harapan hidup mencapai 74,21 tahun yang artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2020 akan dapat hidup antara 74 sampai dengan 75 tahun. Sedangkan bayi-bayi yang dilahirkan pada tahun 2025 mempunyai umur harapan hidup lebih panjang yakni mencapai 75 – 76 tahun. Peningkatan umur harapan hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup penduduk. Tentunya, intervensi program Pemerintah Kabupaten Pasuruan turut meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

Status Kesehatan Penduduk

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Hasil Susenas Maret tahun 2025 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kabupaten Pasuruan mencapai 8,64 persen. Angka Kesakitan penduduk perempuan tahun 2025 sebesar 8,87 persen, lebih tinggi dari angka kesakitan penduduk laki-laki yaitu 8,40 persen. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa perempuan di Kabupaten Pasuruan lebih rentan mengalami gangguan kesehatan dibandingkan laki-laki.

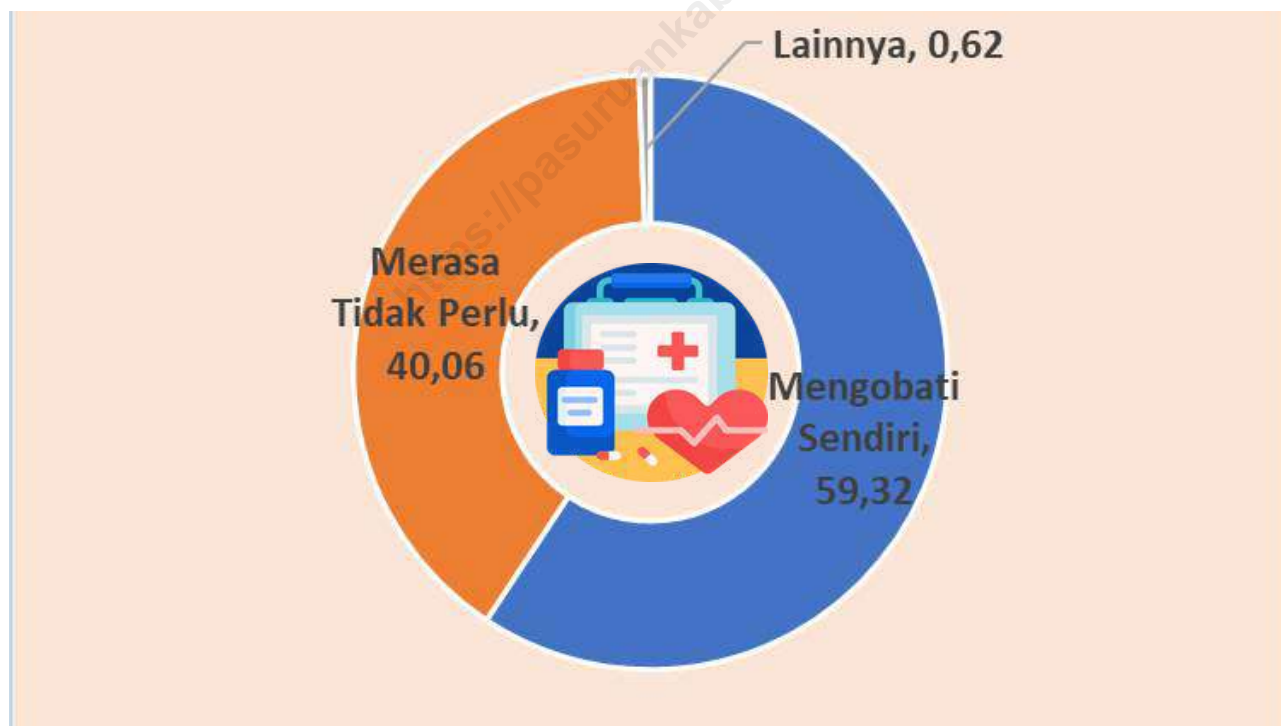
Tabel 3.1
Angka Kesakitan Kabupaten Pasuruan, Tahun 2024 – 2025 (Persen)

Jenis Kelamin	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	10,21	8,40
Perempuan	8,75	8,87
Jumlah	9,47	8,64

Sumber : Hasil Susenas Maret Tahun 2024 – 2025

Data Susenas Maret tahun 2025 menunjukkan bahwa masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan tidak melakukan rawat jalan dengan alasan sebagai berikut:

- Sekitar 59,32 persen penduduk Kabupaten Pasuruan memilih mengobati sendiri keluhan kesehatannya, baik dengan membeli obat bebas, istirahat, atau menggunakan obat tradisional.
- Sebanyak 40,06 persen merasa tidak perlu berobat, yang dapat mengindikasikan bahwa keluhan dirasakan ringan, adanya keterbatasan akses, atau kurangnya kesadaran untuk memeriksakan kondisi ke fasilitas kesehatan.



Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, 2025

Gambar 3.2 Persentase Penduduk Kabupaten Pasuruan Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir tetapi tidak Rawat Jalan, 2025

Fasilitas Tenaga Kesehatan

Terdapat tiga pilar untuk mewujudkan SDGs dalam Bidang Kesehatan, yaitu:

- a. Paradigma sehat merupakan pendekatan yang mengedepankan konsep *promotive* dan *preventif* dalam pelayanan kesehatan dan menempatkan kesehatan sebagai input dari sebuah proses pembangunan;
- b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan dan diarahkan untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan;
- c. Jaminan Kesehatan Nasional, negara bertekad untuk menjamin seluruh penduduk dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia dalam pelayanan kesehatannya.

Ketersediaan fasilitas tenaga kesehatan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan suatu wilayah. Secara umum pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Dampak perbedaan kualitas kesehatan yang nyata antara penduduk di daerah perdesaan dengan penduduk daerah perkotaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan ketersediaan dan jarak menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, ditambah lagi perilaku penduduk itu sendiri. Tingginya persentase penduduk di daerah perkotaan yang berobat dengan memanfaatkan praktek dokter/klinik dikarenakan lebih mudahnya akses dan kualitas pelayanan yang lebih baik, berbagai keluhan dan masalah kesehatan segera tertangani lebih cepat jika dibandingkan dengan kondisi di daerah perdesaan.

Secara menyeluruh, kondisi penduduk yang berobat ke pelayanan kesehatan dengan tenaga ahli kesehatan yang terlatih mengalami peningkatan yang sangat nyata dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Terjadinya pergeseran dan perubahan penduduk yang berobat dari tenaga kesehatan yang kurang/tidak terlatih/tradisional menuju ke tenaga kesehatan yang terlatih secara medis memperlihatkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan akan pentingnya kesehatan, juga merupakan indikator meningkatnya kondisi sosial ekonomi suatu wilayah bahkan negara.

Tabel 3.2
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Pasuruan, 2024 – 2025 (persen)

Tempat Berobat Jalan	2024	2025
(1)	(2)	(3)
RS Pemerintah	4,33	10,39
RS Swasta	7,57	4,84
Klinik/Praktek Dokter/Bidan	62,56	58,17
Puskesmas	23,61	26,71
UKBM, Praktek Pengobatan Tradisional, Lainnya	8,75	2,40

Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, 2024–2025

Pada tahun 2025, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun swasta sebesar 15,23 persen, mengalami peningkatan sebesar 27,98 persen dibanding tahun 2024. Adanya program Pemerintah Kabupaten Pasuruan yaitu program Universal Health Coverage (UHC) memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan sehingga banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk berobat ke rumah sakit. Namun, masyarakat masih lebih dominan berobat jalan dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan berupa bidan dan dokter praktek/klinik. Persentasenya masih lebih dari 50 persen, meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 62,56 persen pada tahun 2024 dan menjadi sebesar 58,17 persen pada tahun 2025. Tempat praktek dokter/Klinik atau bidan masih menjadi pilihan masyarakat dalam berobat jalan dikarenakan pasien bisa langsung ditangani dan mendapatkan resep atau obat tanpa menunggu antrian serta rangkaian prosedur administrasi yang ada di rumah sakit.

Tabel 3.3

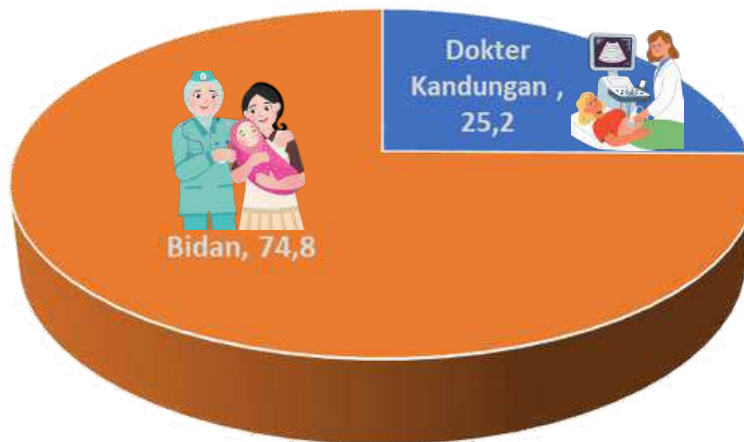
Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun di Kabupaten Pasuruan Menurut Tempat Melahirkan Terakhir Selama 2 Tahun Terakhir, 2025 (persen)

Tempat Berobat Jalan	2025
(1)	(2)
RS Pemerintah/Swasta	25,20
Praktek Tenaga Kesehatan	62,66
Klinik/Puskesmas/Pustu/Polindes/Poskesdes/Rumah lainnya	12,14

Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, 2025

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2025, menunjukkan bahwa perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun di Kabupaten Pasuruan yang melahirkan anak lahir hidup yang saat ini usianya kurang dari 2 tahun menurut tempat melahirkan terlihat bahwa Praktek Tenaga Kesehatan menjadi pilihan terbanyak penduduk di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 dengan persentase mencapai 62,66 persen. Selanjutnya RS Pemerintah/Swasta dengan persentase 25,20 persen.

Usaha pemerintah daerah dalam menyediakan tenaga kesehatan yang handal memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Pada tahun 2025, persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan yang meliputi dokter kandungan dan bidan sudah berada pada angka 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh ibu melahirkan kini memperoleh penanganan persalinan sesuai standar medis yang aman. Selain itu, keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan daerah dalam meningkatkan akses layanan kesehatan maternal, memperkecil risiko komplikasi persalinan, serta mendukung penurunan angka kematian ibu dan bayi. Dengan tercapainya target ini, pemerintah daerah tidak hanya mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan. Keberlanjutan program pembinaan tenaga medis dan peningkatan infrastruktur kesehatan menjadi kunci untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian positif ini pada tahun-tahun berikutnya.



Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, 2025

Gambar 3.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15–49 Tahun di Kabupaten Pasuruan Menurut Penolong Persalinan, 2025

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata, serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu, serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, indikator yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

70,05%

Perempuan 15-49 Tahun Berstatus Kawin



27%

Perempuan 10 Tahun ke Atas
Kawin di Usia Lebih dari 20 Tahun





Bab 4 Fertilitas dan Keluarga Berencana

Kebijakan penduduk dapat mempengaruhi fertilitas baik untuk menaikkan maupun menurunkan angka kelahiran. Pada waktu ini, kebijakan mengenai fertilitas hanya dihubungkan dengan penurunan fertilitas melalui Keluarga Berencana. Bahkan banyak orang yang beranggapan bahwa kebijakan penduduk identik dengan Keluarga Berencana.

Fertilitas dan Keluarga Berencana

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besarnya jumlah penduduk di suatu wilayah selain kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Angka fertilitas yang tinggi disertai angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan pertambahan penduduk yang tinggi. Apabila fertilitas tidak dapat terkendali maka akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk yang menyebabkan jumlah penduduk semakin tidak terkendali. Tentu hal ini akan memicu berbagai macam permasalahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu, ledakan penduduk yang terjadi akan menyebabkan beban pemerintah semakin besar dan bisa menghambat pembangunan nasional apabila tidak dikelola dengan baik.

Tabel 4.1

Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun di Kabupaten Pasuruan Menurut Status Perkawinan (Persen), 2025

Status Perkawinan	2025
(1)	(2)
Belum Kawin	24,03
Kawin	70,05
Cerai Hidup/Mati	5,92
Jumlah	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 ada sebanyak 70,05 persen. Sedangkan yang belum kawin terdapat sebanyak 24,03 persen dan sisanya sebanyak 5,92 persen telah cerai hidup/mati. Sisi positif yang tampak adalah nilai-nilai keluarga yang kuat dan stabilitas dalam komunitas. Namun disisi lain, banyaknya perempuan yang menikah menandakan kurangnya pilihan bagi perempuan selain menikah dan rendahnya pemberdayaan perempuan. Oleh karenanya perlu diperhatikan secara mendalam, salah satunya dengan melihat umur kawin pertamanya.

Tabel 4.2

Wanita Berumur 10 Tahun Keatas yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Pasuruan (Persen), 2025

Kelompok Umur	2025
(1)	(3)
≤ 16	23,63
17 – 18	24,92
19 – 20	24,45
21 +	27,00

Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, 2025

Angka kelahiran (fertilitas) sangat dipengaruhi oleh usia perkawinan pertama perempuan serta angka prevalensi keluarga berencana (KB). Usia perkawinan pertama seorang perempuan berpengaruh terhadap resiko melahirkan, karena semakin muda usia perkawinan pertama, maka akan semakin besar resiko keselamatan ibu maupun anak selama masa kehamilan maupun saat melahirkan.

Di Kabupaten Pasuruan, masih ditemukan wanita yang menikah pertama kali pada usia kurang dari 17 tahun pada tahun 2025, sebanyak 23,63 persen. Selain rendahnya tingkat pendidikan, perkawinan pada kelompok usia muda tersebut akan menyebabkan peluang lebih besar untuk memiliki jumlah anak lebih banyak, mengingat masa reproduksinya yang relatif panjang. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan akses program keluarga berencana, khususnya pada kelompok usia perkawinan dini, supaya mereka bisa merencanakan kehamilan dengan baik. Namun secara rata-rata, umur perkawinan pertama wanita berumur 10 tahun ke atas di Kabupaten Pasuruan berada pada usia sekitar 19-20 tahun. Jika mengacu pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan (Pusdu) BKKBN, usia tersebut merupakan usia menikah yang ideal bagi wanita.

Selain kebijakan terkait program keluarga berencana, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat merancang kebijakan yang tepat sasaran, seperti program pemberdayaan ekonomi perempuan, perluasan akses permodalan, serta peningkatan alternatif jalan hidup di luar pernikahan. Memastikan akses pendidikan yang setara dan berkualitas bagi anak perempuan hingga jenjang yang tinggi merupakan langkah fundamental untuk menaikkan usia perkawinan pertama. Kebijakan-kebijakan yang berfokus pada akar masalah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan di mana setiap perempuan memiliki otonomi penuh untuk menentukan masa depannya.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Dari Program KB ini, diharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant, sehingga laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai, serta memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Tabel 4.3

Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Kabupaten Pasuruan (Persen), 2023 – 2024

Alat/Cara KB	2023	2024
(1)	(2)	(3)
MOW/Tubektomi	3,72	4,28
MOP/Vasektomi	0,00	0,00
AKDR/IUD/Spiral	4,81	4,71
Suntikan KB	67,61	65,71
Susuk KB/Norplan/Implan/Alwait	4,38	6,91
Pil KB	18,82	18,24
Kondom	0,00	0,15
Intravag/Kondom Wanita	0,00	0,00
Tradisional	0,66	0,00

Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, 2023–2024

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2024, persentase wanita berumur 15–49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB adalah sebanyak 64,53 persen. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 73,00 persen pada tahun 2023. Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa dari berbagai macam alat atau cara kontrasepsi menurut jenis KB yang digunakan, suntikan dan pil adalah yang paling banyak diminati para wanita. Penggunaan alat kontrasepsi suntikan KB di tahun 2024 terdapat sebanyak 65,71 persen. Nilai ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu sebanyak 67,61 persen. Penggunaan pil KB juga mengalami penurunan dari 18,82 persen di tahun 2023 menjadi 18,24 persen pada tahun 2024. Begitu pula dengan penggunaan AKDR/IUD/Spiral.

Sementara itu, pilihan alat kontrasepsi seperti MOP/Tubektomi, Susuk, dan Kondom mengalami peningkatan. Para wanita di Kabupaten Pasuruan sudah mulai berpikir jauh ke depan dengan pilihan alat kontrasepsi jangka panjang bahkan bersifat permanen.

Penggunaan alat kontrsepsi suntikan KB merupakan pilihan yang paling banyak diminati oleh para wanita, baik tahun 2023 maupun tahun 2024. Hal tersebut, disebabkan oleh kemudahan dan keterjangkauan dari segi biaya dan tempat pelayanan bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Untuk mendapat pelayanan KB selain di Rumah Sakit atau Puskesmas, masyarakat bisa mengakses ke Tempat Praktek Bidan/Perawat, Poskesdes, Pustu, ataupun Polindes. Jika dilihat dari segi efektifitasnya, pilihan ini bisa mencapai 99 persen dalam upaya mencegah kehamilan.

<https://pasuruankab.bps.go.id>

PENDIDIKAN

7,47 TAHUN



Rata-rata Lama Sekolah Penduduk
di Kabupaten Pasuruan



34,51%

Mayoritas Penduduk 10 Tahun Keatas Tamatan
Sekolah Dasar/Sederajat







Bab 5 Pendidikan

Kualitas pembangunan dapat dilihat dari bagaimana sumber daya manusianya dapat mengelola pemanfaatan sumber daya yang tersedia sehingga akan tercipta produktivitas pembangunan yang tinggi. Untuk menciptakan sumberdaya manusia yang handal diperlukan kualitas pendidikan yang relevan sebagai modal dasar dalam pembangunan. Untuk itu, pendidikan seringkali dijadikan sumber daya manusia yang tinggi dapat menciptakan multiplier effect dalam pembangunan ekonomi. Melalui pendidikan, seseorang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Dikutip dari teori *Human Capital* yang berpendapat bahwa pendidikan merupakan investasi bagi sumber daya manusia sehingga dengan pendidikan, seseorang dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi produksi, serta meningkatkan kesejahteraan.

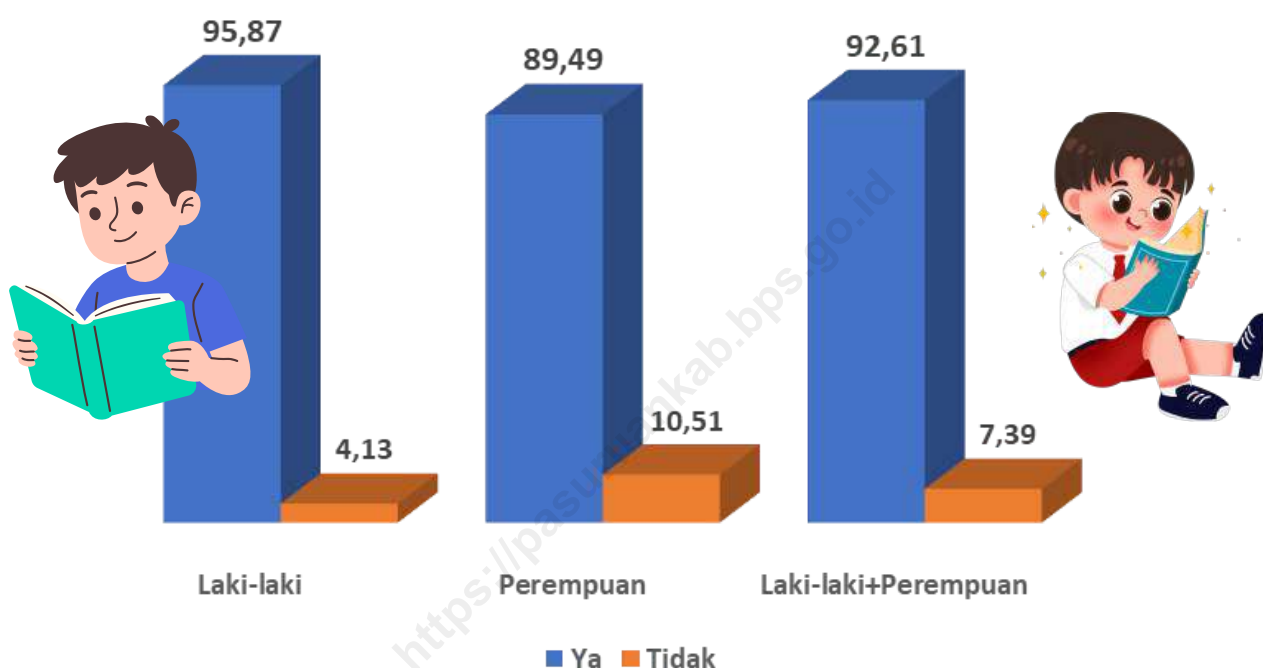
Negara menjamin terpenuhinya kebutuhan pendidikan dengan akses yang merata serta berkualitas sehingga tiap warganya mampu menempuh pendidikan. Pelaksanaannya diatur melalui Undang-undang (UU) yang sudah berberapa kali direvisi, disesuaikan dengan perkembangan jaman. Terakhir yaitu UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Undang-undang ini, pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Adapun program kebijakan yang diluncurkan pemerintah terkait hal ini seperti program Bantuan Operasional sekolah (BOS) kepada para siswa jenjang SD dan SMP serta program Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) kepada para siswa SMA dan SMK.

Pentingnya pendidikan juga termaktub dalam prioritas keempat pembangunan berkelanjutan SDGs, yaitu mewujudkan pendidikan berkualitas, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hanya untuk semua. Untuk itu, pembahasan mengenai indikator bidang pendidikan di Kabupaten Pasuruan menjadi penting untuk melihat sejauh mana capaian keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan sekaligus mengidentifikasi tantangan ke depan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembahasan tersebut akan difokuskan pada indikator capaian di bidang pendidikan seperti angka buta huruf, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan, dan tingkat partisipasi sekolah. Sedangkan indikator tantangan di bidang pendidikan akan difokuskan pada kualitas pelayanan pendidikan.

Angka Buta Huruf

Pembangunan di bidang pendidikan, baik secara formal maupun non formal, mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi masyarakat di suatu wilayah dan ukuran mendasar tingkat pendidikan secara makro adalah kemampuan baca tulis (melek huruf) penduduk. Kemampuan baca tulis merupakan kemampuan intelektual minimum karena sebagai besar informasi dan ilmu pengetahuan diperoleh melalui membaca.

Angka buta huruf merupakan suatu ukuran persentase penduduk usia lima belas (15) tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis. Dapat membaca dan menulis diartikan dapat membaca dan menulis kalimat sederhana atau dapat membaca dan menulis huruf Braile bagi penyandang tuna netra.



Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasuruan, 2025

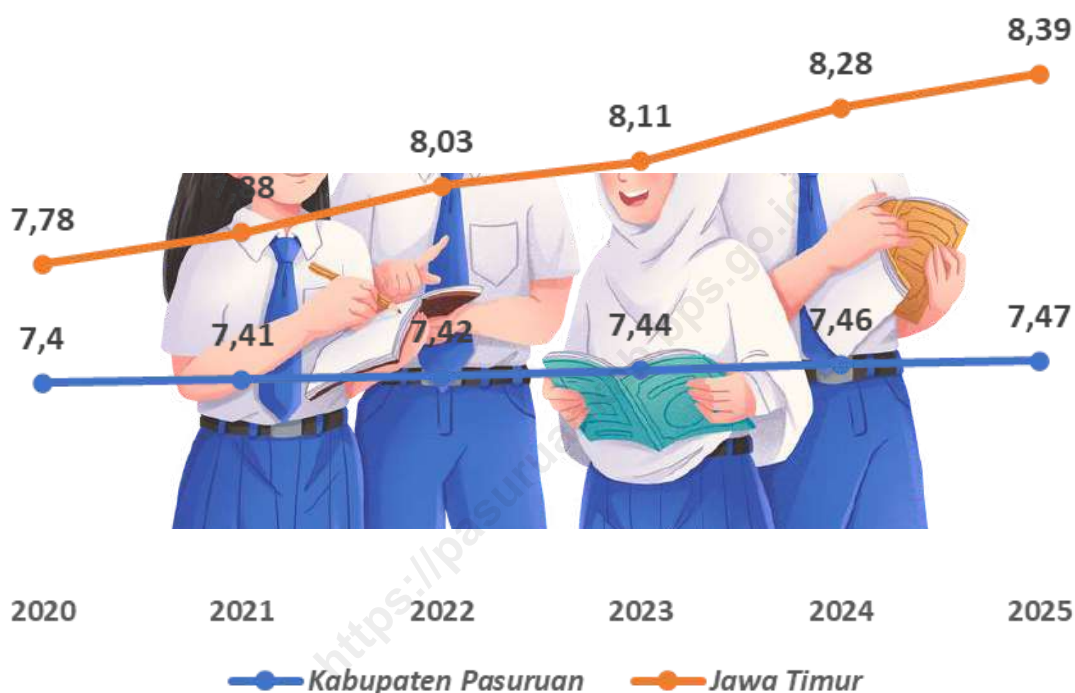
Gambar 5.1 Persentase Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Pasuruan (Persen), 2025

Sebagai salah satu kabupaten besar di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan belum terbebas dari buta huruf. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka buta huruf di Kabupaten Pasuruan tahun 2025 mencapai 7,39 persen. Persentase ini mencakup penduduk laki-laki dan perempuan dengan usia 15 tahun keatas yang tidak bisa membaca dan menulis. Diantaranya adalah penduduk usia tua (60 tahun keatas) yang sebagian dari mereka belum punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan di jamannya. Angka buta huruf penduduk perempuan di Kabupaten Pasuruan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Angka buta huruf penduduk perempuan tahun 2025 sebesar 10,51 persen, sedangkan angka buta huruf penduduk laki-laki sebesar 4,13 persen. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya fasilitas pendidikan, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor budaya, dan lainnya.

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dengan kata lain, RLS menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia dalam suatu wilayah.

Perhitungan RLS dengan mengasumsikan bahwa penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa mempertimbangkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.



Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, 2025

Gambar 5.2 Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Pasuruan, 2020 - 2025

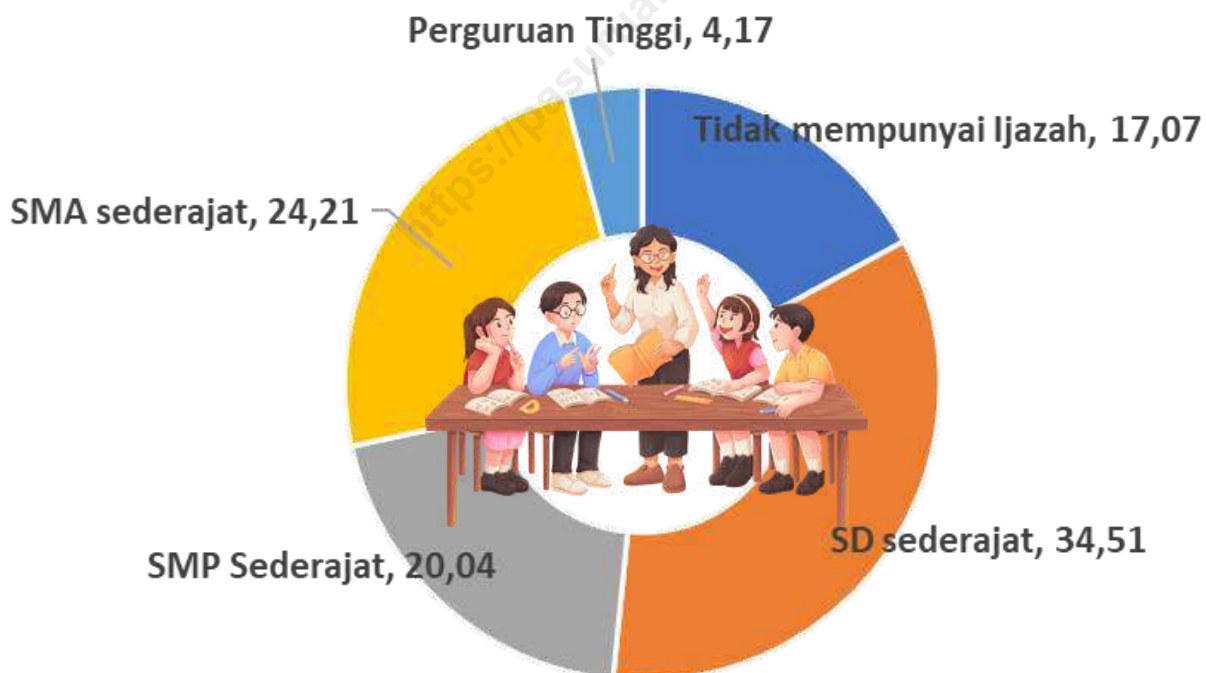
Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2025 mencapai 7,47 tahun, artinya bahwa secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam bangku pendidikan formal antara kelas VII (SMP kelas I) hingga kelas VIII (SMP kelas 3). Dengan kata lain, rata-rata penduduk Kabupaten Pasuruan hanya bisa mencapai ketuntasan Sekolah Dasar saja. Tentunya capaian ini masih dibawah target pemerintah dengan program wajib belajar 9 tahunnya. Jika dibandingkan tahun 2024, rata-rata lama sekolah Kabupaten Pasuruan mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,01 persen poin. Namun jika dilihat tren selama 5 tahun rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasuruan menunjukkan kenaikan meskipun agak lambat.

Kondisi diatas tentu sangat berpengaruh pada penyediaan sumber daya manusia yang handal dan siap pakai di bursa tenaga kerja. Oleh sebab itu program-program seperti wajib belajar 12 tahun harus mendapatkan perhatian serius dan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Perlu menggerakkan lebih intensif lagi untuk program Paket A, B dan C sehingga bisa memutus mata rantai putus sekolah di Kabupaten Pasuruan.

Tingkat Pendidikan

Secara umum, tingkat pendidikan di Kabupaten Pasuruan masih rendah. Mayoritas penduduk hanyalah lulusan SD/ sederajat saja. Persentase penduduk Kabupaten Pasuruan usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah SD sebanyak 17,07 persen, tamat sekolah dasar (SD) atau sederajatnya sebesar 34,51 persen dan tamat sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat sebesar 20,04 persen. Dengan demikian, sebanyak 71,62 persen penduduk Kabupaten Pasuruan hanya tamatan SMP dan yang sederajat ke bawah.

Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah dirasakan belum optimal diupayakan menjadi 12 tahun Tercantum di nawacita bahwa wajib belajar 12 tahun. Kegiatan yang mengarah ke wajib belajar 12 tahun. Hal ini terlihat dari persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat sekolah menengah atas (SMA) ke atas hanya 28,38 persen yang terdiri dari tamat SMA/SMK atau sederajatnya sebesar 24,21 persen, dan tamatan hingga perguruan tinggi sebesar 4,17 persen.

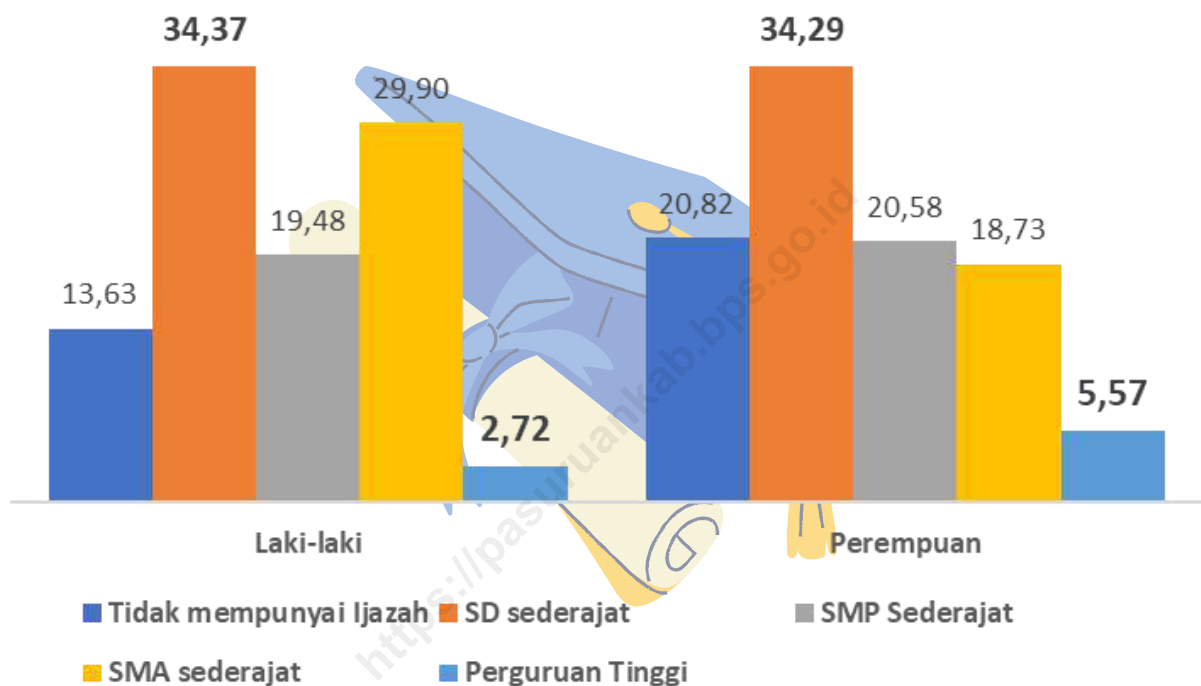


Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, 2025

Gambar 5.3 Persentase Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di Kabupaten Pasuruan, 2025

Seyogyanya pada usia 15 tahun setidaknya ijazah SD sudah harus dimiliki. Faktor pendukung rendahnya tingkat pendidikan salah satunya terkait kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan dan merasa bahwa pendidikan yang tinggi bukanlah sebuah kewajiban. Masih rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Pasuruan seharusnya menjadi pelecut semangat pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk membenahi pendidikan agar sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Pasuruan semakin mampu bersaing di wilayah manapun dan mampu menghadapi ketatnya persaingan di masa datang.

Perhitungan RLS dengan mengasumsikan bahwa penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa mempertimbangkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.



Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, 2025

Gambar 5.4 Persentase Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Pasuruan menurut Jenis Kelamin, 2025

Bila dilihat berdasarkan *gender*, data Susenas Maret 2025 menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan capaian Pendidikan. Hal ini terlihat dari persentase penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang menamatkan jenjang SMA/Sederajat di Kabupaten Pasuruan yaitu 18,73 persen. Nilai ini lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 29,90 persen. Di sisi lain, persentase perempuan usia 15 tahun ke atas yang tidak punya ijazah yakni tidak menamatkan pendidikan sekolah dasar dan tidak/belum pernah bersekolah lebih tinggi dibandingkan laki-laki dengan persentase masing masing 13,63 persen untuk yang berjenis kelamin laki-laki dan 20,82 persen untuk yang berjenis kelamin perempuan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Pasuruan, agar capaian pendidikan yang ditamatkan bagi penduduk perempuan dapat lebih ditingkatkan kembali. Salah satu faktor yang mendorong pencapaian tingkat pendidikan perempuan adalah persepsi orang tua mengenai pendidikan. Dimana persepsi ini dapat dipengaruhi oleh umur, lingkungan, pola pikir, kemampuan ekonomi, dan tingkat pendidikan orang tua.

Tingkat Partisipasi Sekolah

Salah satu cara untuk mengetahui capaian di bidang pendidikan adalah dengan melihat tingkat partisipasi sekolah penduduknya. Indikator yang digunakan untuk mengkaji tingkat partisipasi sekolah diantaranya adalah angka partisipasi sekolah (APS).

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan sebagai indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam bangku pendidikan.

Berdasarkan tabel 5.1, APS kelompok usia 7-12 tahun Kabupaten Pasuruan tahun 2024 sebesar 98,99 persen yang berarti bahwa hampir semua penduduk Kabupaten Pasuruan usia 7-12 tahun mengenyam pendidikan di sekolah (tanpa memandang tingkatan sekolahnya). APS kelompok usia 13-15 tahun tahun 2024 sebesar 93,82 persen, lebih rendah dari APS kelompok usia 7 – 12 tahun. Hal ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pasuruan yang berusia 13 – 15 tahun terdapat lebih dari 93 persen memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan di sekolah.

Tabel 5.1

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Sekolah di Kabupaten Pasuruan, 2024

Kelompok Umur	APS
(1)	(4)
7 – 12	98,99
13 – 15	93,82
16 – 18	68,54
19 – 23	16,24

Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasuruan, 2024

Sementara itu, APS kelompok usia 16-18 tahun tahun 2024 hanya sebesar 68,54 persen. Angka ini lebih kecil dibandingkan APS kelompok usia 13-15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada sekitar 31,46 persen penduduk Kabupaten Pasuruan yang berusia 16-18 tahun tidak melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan SMA dan yang sederajat.

APS dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat partisipasi pendidikan penduduk pada kelompok usia tertentu, tetapi APS tidak dapat mengukur ketepatan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh kelompok usia tertentu. Untuk melihat partisipasi penduduk usia tertentu yang mengenyam pendidikan formal sesuai dengan kelompok usianya, digunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM).

APM merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara usia dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Perhitungan APM dari banyaknya penduduk usia sekolah tertentu yang sedang sekolah pada jenjang yang sesuai dibagi dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sesuai, baik pendidikan formal maupun non formal seperti Paket A, B dan C.

Nilai APM berada pada range 0-100 menunjukkan seberapa banyak persentase penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Jika seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

APM di Kabupaten Pasuruan pada kelompok jenjang SD sederajat di tahun 2024 sebesar 99,60 persen atau naik sekitar 2,25 persen dari tahun sebelumnya yang berkisar 97,35 persen (2023). Angka ini menggambarkan bahwa 99,60 persen penduduk kelompok usia SD sederajat bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi setingkat SMP sederajat, nilai APM semakin menurun, yakni mencapai 82,88 persen di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2024 penduduk pada jenjang SMP sederajat yang bersekolah tepat waktu. Angka ini meningkat 0,34 poin persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 82,54 persen. Sedangkan pada jenjang SMA sederajat sekitar 51,01 persen penduduk yang bersekolah tepat sesuai usianya di tahun 2024. Pada jenjang ini nilai APM Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan yakni sekitar 0,76 persen dibandingkan tahun 2023.

Tabel 5.2

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Sekolah di Kabupaten Pasuruan, 2023 - 2024

Jenjang Pendidikan	2023		2024	
	APM	APK	APM	APK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD Sederajat	97,35	107,35	99,60	103,05
SMP Sederajat	82,54	97,88	82,88	95,76
SMA Sederajat	50,25	73,19	51,01	76,02

Sumber : Publikasi Kabupaten Pasuruan Dalam Angka, 2025

Selain APM, indikator lain yang digunakan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama, baik pendidikan formal maupun non formal seperti Kejar Paket.

Melalui APK dapat diketahui seberapa besar tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. APK menunjukkan kapasitas sistem pendidikan mampu menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu serta sebagai indikator pelengkap dari APM dan APS sehingga dapat diketahui besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melewati dari usia sekolah seharusnya.

Nilai APK dapat melebihi 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini dapat dikarenakan adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang terlambat bersekolah, maupun tinggal kelas. APK juga dapat digunakan untuk mengetahui bahwa wilayah tersebut menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang seharusnya. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APM selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

APK Kabupaten Pasuruan pada setiap jenjang pendidikan lebih fluktuatif dibandingkan APM. Pada jenjang SD/Sederajat, APK di tahun 2023 dan 2024 masing-masing bernilai 107,35 persen dan 103,05 persen. Penurunan ini memiliki arti bahwa di tahun 2023, persentase penduduk usia jenjang SD/Sederajat yang menempuh pendidikan tepat waktu lebih banyak dibandingkan tahun 2024. Sedangkan jenjang SMP/Sederajat menunjukkan setidaknya hanya 97,88 persen di tahun 2023 dan 95,76 persen di tahun 2024 dari penduduk usia jenjang SMP/Sederajat yang sedang menempuh belajar tepat waktu pada jenjang tersebut. Selanjutnya pada jenjang SMA/ sederajat di tahun 2024 adalah 76,02 persen. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yaitu 73,19 persen. Nilai APK di tahun 2024 yang sebesar 76,02 persen menunjukkan bahwa populasi penduduk yang bersekolah pada jenjang tersebut tanpa memandang usianya, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan populasi penduduk pada usia sekolah jenjang pendidikan yang sesuai. Kondisi ini, hendaknya menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Pasuruan agar di tahun mendatang pencapaian pada jenjang SMA/ Sederajat dapat ditingkatkan kembali.

Fluktuasi APK pada setiap jenjang pendidikan tersebut memberikan gambaran bahwa dinamika partisipasi sekolah di Kabupaten Pasuruan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial ekonomi, ketersediaan satuan pendidikan yang terjangkau, serta tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan berkelanjutan. Penurunan APK, khususnya pada jenjang SMA/ Sederajat, juga dapat mengindikasikan adanya hambatan yang dihadapi peserta didik dalam melanjutkan pendidikan, baik berupa keterbatasan biaya, jarak tempuh sekolah, maupun pilihan untuk langsung memasuki dunia kerja.

Kualitas Pelayanan Pendidikan

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional khususnya dalam bidang Pendidikan yaitu pelayanan Pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan Pendidikan merupakan program utama mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan Pendidikan antara lain rasio murid-guru dan rasi guru-sekolah

Rasio murid-guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja dalam mengajar. Rasio murid-guru ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi nilai rasionya, diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah. Dengan kata lain, jika rasio tinggi, berarti satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Semakin banyak jumlah murid di dalam suatu kelas dengan jumlah pengajar hanya satu orang maka akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran. Asumsinya, rasio murid-guru yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil sehingga memungkinkan para guru untuk lebih memperhatikan setiap siswa. Indikator ini tidak memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas belajar/mengajar, seperti perbedaan dalam kualifikasi guru, pelatihan, pengalaman dan status, metode pengajaran, kondisi bahan ajar, dan variasi di dalam kelas.

Di Kabupaten Pasuruan, rasio Murid dengan Guru untuk jenjang SD/MI sebesar 13,71; SMP/MTS sebesar 13,04; SMA/SMK/MA sebesar 15,19. Artinya pada jenjang SD/MI secara rata rata satu orang guru memiliki tanggung jawab mendidik siswa sebanyak 13-14 orang peserta didik. Untuk jenjang SMP/MTS satu orang guru memiliki tanggung jawab mendidik siswa sebanyak 13-14 orang peserta didik. Sementara untuk jenjang SMA/SMK/MA satu orang guru memiliki tanggung jawab mendidik siswa sebanyak 15-16 orang peserta didik. Angka rasio murid-guru semakin menurun seiring dengan peningkatan jenjang Pendidikan. Secara umum rasio siswa dengan guru tidak berbeda jauh untuk setiap jenjang Pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi guru pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Pasuruan relatif merata. Rasio yang tidak terlalu tinggi mengindikasikan bahwa proses pembelajaran berpotensi berlangsung lebih efektif karena guru memiliki kesempatan yang cukup untuk memberikan perhatian kepada setiap peserta didik. Selain itu, rasio yang stabil di setiap jenjang pendidikan dapat menjadi indikator bahwa kebijakan pemerataan tenaga pendidik telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, rasio murid-guru yang ideal tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga pendidik semata, melainkan juga oleh sebaran guru di setiap wilayah, kualifikasi guru, serta kebutuhan khusus masing-masing satuan pendidikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan perlu diimbangi dengan pemerataan guru sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.

Tabel 5.3

Rasio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pasuruan, 2024-2025

Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru		Jumlah Murid		Rasio Murid-Guru	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/MI	10.202	11.179	152.634	153.230	14,96	13,71
SMP/MTS	5.230	5.661	71.327	73.823	13,64	13,04
SMA/SMK/MA	3.900	4.103	60.621	62.305	15,54	15,19

Sumber : Publikasi Kabupaten Pasuruan Dalam Angka, 2025

Rasio guru-sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui kekurangan/kelebihan tenaga pengajar yang mengajar di sekolah pada suatu daerah tertentu. Semakin rendah nilai rasio berarti jumlah tenaga pengajar yang mengajar di suatu jenjang pendidikan tertentu semakin terbatas, sebaliknya semakin besar nilai rasio mengindikasikan kemungkinan terjadinya kelebihan tenaga pengajar pada sekolah tersebut, sehingga kebijakan berupa mutasi guru perlu dilakukan.

Tabel 5.4

Rasio Guru Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pasuruan, 2024-2025

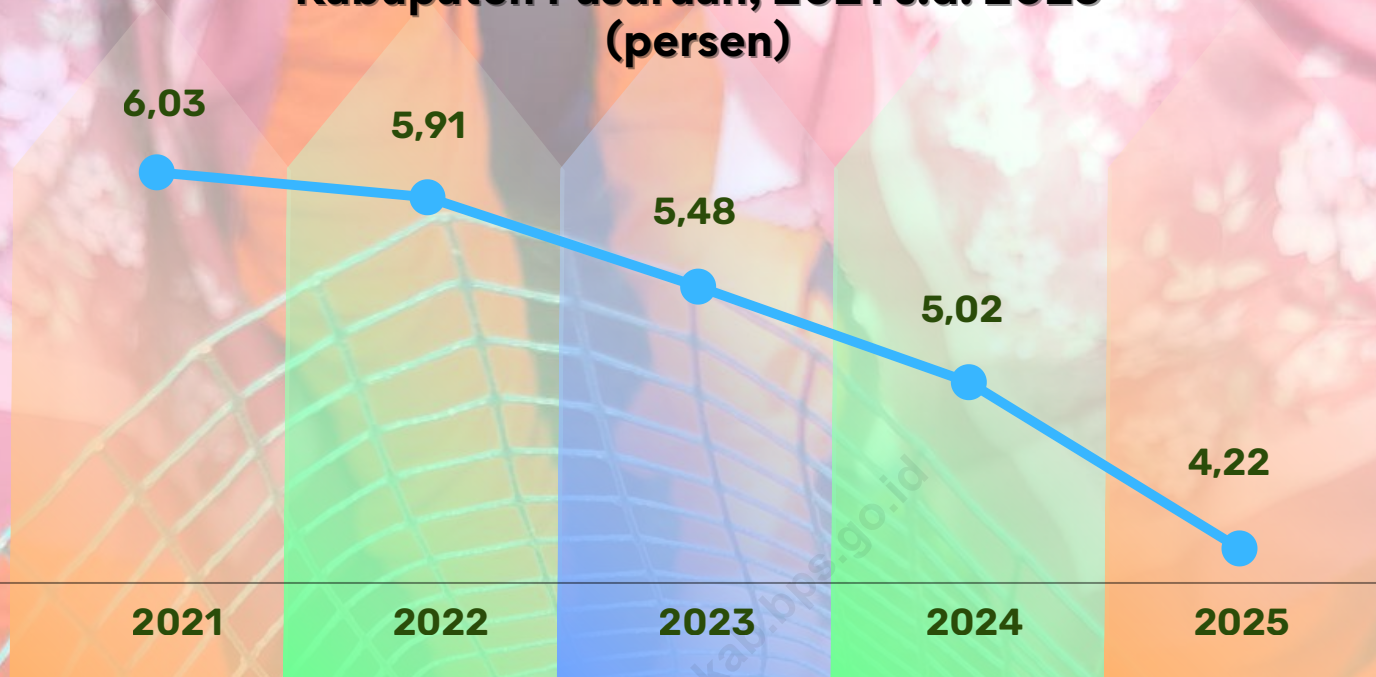
Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah		Jumlah Guru		Rasio Guru-Sekolah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/MI	1.030	1.020	10.202	11.179	9,90	10,96
SMP/MTS	344	347	5.230	5.661	15,20	16,31
SMA/SMK/MA	203	204	3.900	4.103	19,21	20,11

Sumber : Publikasi Kabupaten Pasuruan Dalam Angka, 2025

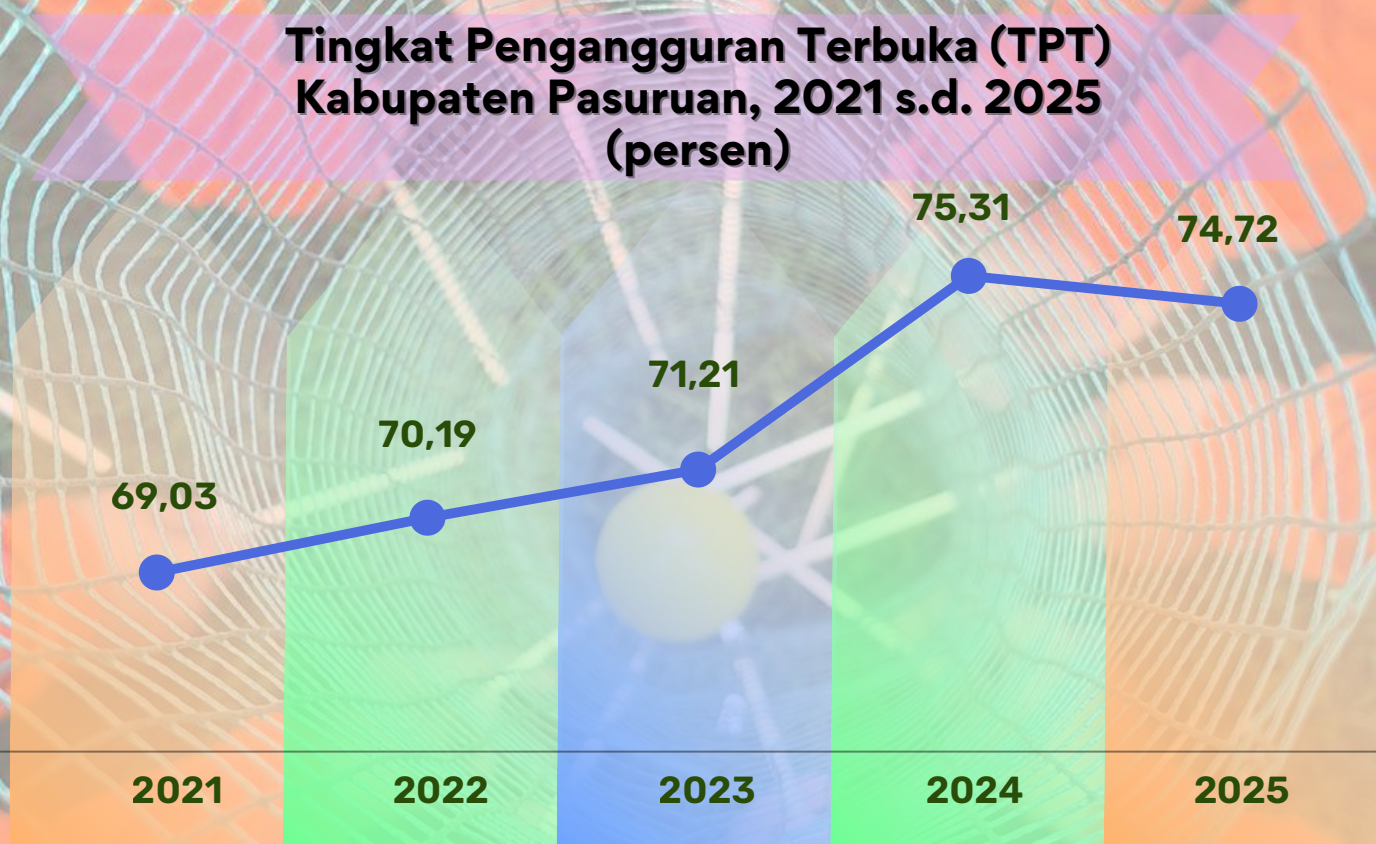
Selain rasio antara murid dan guru, indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kualitas pelayanan adalah rasio antara murid dan sekolah. Rasio murid per sekolah menggambarkan kemampuan sekolah dalam menampung peserta didik. Selain hal tersebut diatas, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan tidak hanya didorong oleh penambahan jumlah guru dan unit sekolah (faktor input) saja, namun yang perlu menjadi perhatian adalah keseluruhan sistem pendidikan. Sebuah sistem mengandung rangkaian kegiatan mulai dari input, proses, output serta faktor internal dan eksternal, dimana masing-masing komponen kegiatan tersebut mempunyai fungsi tertentu untuk mencapai tujuan utama sistem tersebut, yaitu “Mencerdaskan generasi penerus bangsa.”

KETENAGAKERJAAN

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Pasuruan, 2021 s.d. 2025
(persen)**



**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Pasuruan, 2021 s.d. 2025
(persen)**







Bab 6 Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin dengan menitikberatkan pada masalah perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Dengan demikian pemerintah perlu strategi pembangunan yang berorientasi pada perluasan/pembukaan kesempatan kerja. Kemudian sejauh mana pemerintah mengambil strategi seperti itu dan menjalankannya seefektif mungkin, telah dianggap sebagai salah satu batu ujian yang penting artinya bagi keberhasilan pembangunan.

Pentingnya peranan tenaga kerja dalam proses rutin dan pertumbuhan ekonomi tidak mungkin dan tidak pernah terlupakan. Karena tenaga kerja mempunyai dua sisi yang saling melekat satu sama lain. Sisi yang satu mengambil peranan fungsional dalam proses produksi yaitu bertindak sebagai faktor produksi. Sisi lain merupakan terminal dari semua kegiatan produksi yaitu sebagai konsumen penerima pendapatan yang bersumber dari proses produksi.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka, utamanya yang telah memasuki usia kerja, diharapkan terlibat di lapangan kerja tertentu atau aktif dalam kegiatan perekonomian.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas. Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja dikenal pula indikator untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Angka TPAK dan TPT bisa mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah serta besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Idealnya capaian hasil pembangunan suatu wilayah dikatakan tinggi apabila angka TPAK tinggi dan TPT yang rendah.

Tabel 6.1

Penduduk Kabupaten Pasuruan Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, 2021-2025

Kegiatan Utama	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angkatan Kerja (Orang)	893.726	916.175	915.507	978.581	981.059
Bekerja (Orang)	839.861	862.062	865.336	929.468	939.649
Pengangguran (Orang)	53.865	54.113	50.171	49.113	41.410
TPT (%)	6,03	5,91	5,48	5,02	4,22

Sumber : Hasil Sakernas, 2021-2025

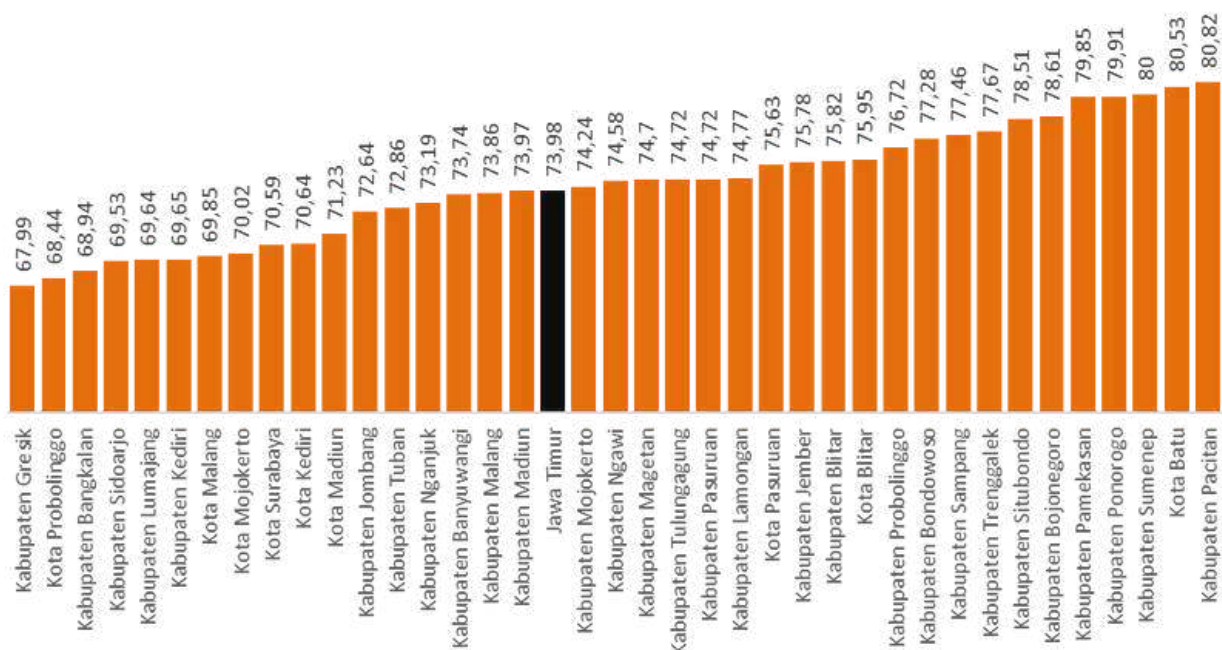
Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 adalah sebesar 981.059 orang. Angka ini merupakan pertambahan sebanyak 2.478 orang dibanding tahun 2024. Jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan trend positif, hal ini sejalan dengan TPAK Kabupaten Pasuruan.



Sumber : Hasil Sakernas, 2021-2025

Gambar 6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Pasuruan (persen), 2021-2025

TPAK Kabupaten Pasuruan 2025 sebesar 74,72 persen mengalami penurunan sebesar 0,59 poin dibandingkan TPAK tahun 2024. Secara umum, angka ini menunjukkan bahwa 74,72 persen penduduk Kabupaten Pasuruan yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan 25,28 persen sisanya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga, maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia (lansia).



Sumber : Hasil Sakernas, 2025

Gambar 6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Timur (Persen), 2025

Ada beberapa kabupaten/kota mempunyai angka TPAK dibawah Kabupaten Pasuruan. Diantara kabupaten/kota tersebut, TPAK terendah adalah Kabupaten Gresik yaitu 67,99 persen. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki TPAK diatas Kabupaten Pasuruan ada sebanyak 16 kabupaten/kota, TPAK paling tinggi adalah Kabupaten Pacitan dengan TPAK sebesar 80,82 persen.

Peningkatan pemahaman masyarakat akan perlunya pendidikan juga mempengaruhi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk memilih melanjutkan pendidikan dan menunda peran aktifnya di pasar kerja. Fenomena tersebut dibarengi dengan semakin didorongnya program wajib belajar dan biaya pendidikan gratis yang ikut menjadi faktor penunda bagi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk terjun ke pasar kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Mendapatkan pekerjaan yang layak merupakan harapan setiap orang. Salah satu cara yang ditempuh untuk memperoleh peluang tersebut adalah melalui pendidikan tinggi yang ditamatkan. Di tengah semakin ketatnya persaingan di dunia kerja serta terbatasnya ketersediaan lapangan usaha, masyarakat berupaya meningkatkan kualitas diri, baik melalui pendidikan formal maupun pengembangan keterampilan tambahan. Upaya ini dilakukan agar mereka memiliki daya saing yang lebih baik dan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar kerja yang terus berkembang.

Namun demikian, muncul permasalahan baru yang tidak dapat diabaikan, yaitu masih banyak lulusan pendidikan tinggi yang belum terserap di dunia kerja. Salah satu penyebabnya adalah kecenderungan sebagian besar lulusan untuk hanya menginginkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditempuh.

Ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, serta sikap selektif dalam memilih pekerjaan, menjadi faktor yang mempersempit peluang mereka untuk segera bekerja.

Selain itu, dinamika pasar kerja yang terus berubah, perkembangan teknologi, dan kebutuhan industri yang semakin spesifik juga menuntut tenaga kerja untuk lebih adaptif. Sayangnya, tidak semua lulusan mampu mengikuti perubahan tersebut. Akibatnya, sebagian dari mereka yang tidak memperoleh pekerjaan akhirnya masuk dalam kelompok pengangguran, meskipun memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi. Kondisi ini menunjukkan perlunya sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha agar kompetensi lulusan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Tabel 6.2

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2024-2025

Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan	2024	2025
(1)	(2)	(3)
SD Ke Bawah	2,31	2,59
SMP	3,54	3,45
SMA	11,24	6,88
SMK	9,97	7,04
Diploma I/II/III	0	0
Universitas	7,48	8,37
Jumlah	5,02	4,22

Sumber : Hasil Sakernas, 2024-2025

Menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, TPT tertinggi adalah tamatan Universitas yaitu sebesar 8,37 persen, artinya dari 100 orang angkatan kerja lulusan Universitas terdapat 8-9 orang yang menganggur. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama lulusan Universitas.

Tidak Sejalan dengan penurunan TPT, secara umum pada tahun 2025 TPT menurut kelompok pendidikan mengalami penurunan pada beberapa jenjang pendidikan saja yaitu pendidikan SMP hingga SMK, TPT pada jenjang pendidikan lainnya mengalami peningkatan dibandingkan TPT pada tahun 2024. Peningkatan cukup signifikan terjadi pada jenjang pendidikan Universitas. Pendidikan tinggi tidak selalu lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan, terbukti melalui angka TPT pada jenjang ini menyumbang cukup besar. Hal ini disebabkan salah satunya adalah *link and match* antara jurusan pendidikan dengan ketersediaan pasar kerja, selain itu kebanyakan penduduk dengan pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki kecenderungan untuk memilih-milih pekerjaan.

Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu Pertanian (pertanian, kehutanan dan perikanan), industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air serta konstruksi) dan jasa-jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan).

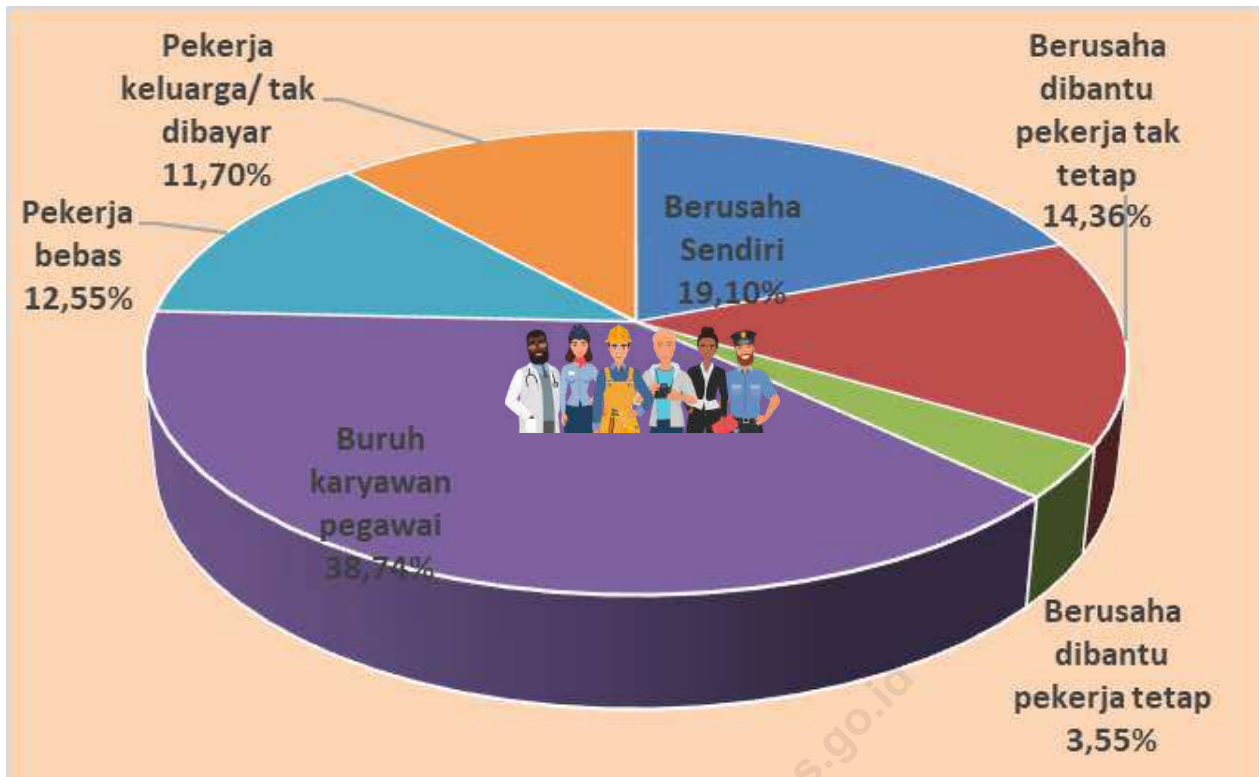
Berdasarkan hasil Sakernas 2025, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor industri mengalami penurunan dibanding tahun 2024 dari 315.040 jiwa menjadi 281.321 jiwa. Peningkatan jumlah pekerja terjadi pada sektor pertanian, sedangkan sektor industri dan jasa mengalami penurunan. Akan tetapi, sektor jasa tetap menjadi lapangan usaha terbesar yang menyerap penduduk bekerja di tahun 2024 sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tidak/belum terjadinya pergeseran komposisi tenaga kerja dan lapangan pekerjaan di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 6.3
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, Tahun 2024-2025 (jiwa)

Kelompok Usaha	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Pertanian	233.621	289.758
Industri	315.040	281.321
Jasa	380.807	368.570
Total	929.468	939.649

Sumber : Hasil Sakernas, 2024-2025

Secara umum, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor kelompok usaha pertanian dan industri menduduki peringkat ketiga dan kedua setiap tahunnya. Sedangkan kelompok lapangan usaha pada sektor jasa tetap menjadi lapangan usaha terbesar setiap tahunnya. Walaupun begitu penduduk bekerja di Kabupaten Pasuruan pada setiap lapangan usaha (Pertanian, Industri, dan Jasa) memiliki persebaran yang cukup rata.



Sumber : Hasil Sakernas, 2025

Gambar 6.3 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Status Usaha, Tahun 2025

Pada tahun 2025, jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai mendominasi dibandingkan status pekerjaan yang lain. Penduduk yang bekerja sebagai buruh/ karyawan adalah sebesar 38,74 persen. Jumlah pekerja yang berusaha sendiri sebanyak 19,10 persen, sedangkan yang berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 14,36 persen. Sementara pekerja dengan status berusaha dibantu pekerja tetap sebanyak 3,55 persen di tahun 2025.

POLA KONSUMSI DAN PENGELUARAN

Pengeluaran Per Kapita Sebulan,
2025

Makanan

Non
Makanan

58,96%

41,04%



Selisih sebesar 3,43%
terhadap tahun 2024





Bab 7 Pola Konsumsi dan Pengeluaran

Pembangunan ekonomi dapat digambarkan dengan kenaikan pendapatan nasional. Salah satu komponen pendapatan nasional adalah konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga. Konsumsi tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, taraf dan pola konsumsi di tingkat individu atau rumah tangga sangat penting untuk di analisis.

Pola konsumsi menunjukkan susunan atau pola terhadap kebutuhan individu atau seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik berupa barang maupun jasa. Pola konsumsi tiap-tiap orang berbeda-beda karena beberapa faktor yang menyebabkannya, jadi susunan atau pola terhadap kebutuhan tiap-tiap orang pasti berbeda-beda. Keinginan untuk mengkonsumsi barang atau jasa dipengaruhi oleh seberapa besar pendapatan mereka yang dialokasikan untuk konsumsi. Bisa diartikan bahwa konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya, semakin besar pendapatan semakin besar pula pengeluaran konsumsi. Sehingga bisa dikatakan bahwa pola konsumsi menjadi indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga.

Pola konsumsi dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya, secara garis besar alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan kedalam dua kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk bukan makanan. Struktur konsumsi masyarakat Kabupaten Pasuruan mulai mengalami perkembangan, sebagian besar pengeluaran konsumsinya tidak lagi untuk konsumsi makanan tetapi untuk konsumsi bukan makanan. Pergeseran pola konsumsi ini dipengaruhi oleh perubahan pendapatan seseorang. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan.

Pengeluaran Penduduk

Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung.

Tabel 7.1

Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan, 2024-2025

Jenis Pengeluaran	Rata-rata Pengeluaran	
	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Makanan	633.030	681.924
Non Makanan	507.103	474.519
· Perumahan	244.375	219.605
· Barang dan Jasa	99.778	106.460
· Pakaian	24.646	25.839
· Barang Tahan Lama	38.678	55.647
· Pajak dan Asuransi	48.696	40.617
· Keperluan Pesta dan Upacara	50.929	26.351
Jumlah	1.140.133	1.156.443

Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasuruan, 2024-2025

Gambaran konsumsi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 7.1. Selama periode 2024-2025, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk meningkat dari Rp1.140.133 menjadi Rp1.156.443. Pada tahun 2024, sekitar Rp633.030 atau 55,53 persen dialokasikan untuk konsumsi makanan, sedangkan Rp507.103 atau 44,47 persen digunakan untuk konsumsi bukan makanan. Pada tahun 2025, pengeluaran untuk makanan meningkat menjadi Rp681.924 atau 58,96 persen, sedangkan pengeluaran bukan makanan menurun menjadi Rp474.519 atau 41,04 persen. Persentase tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran untuk makanan mengalami peningkatan, sementara pengeluaran bukan makanan cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan rumah tangga, semakin besar proporsi pengeluaran yang dialokasikan untuk makanan, terutama makanan dan minuman jadi.

Berdasarkan data Susenas Maret 2024-2025, pengeluaran konsumsi makanan terus menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, sedangkan pengeluaran non-makanan cenderung fluktuatif. Namun demikian, peningkatan pengeluaran non-makanan tetap terjadi pada beberapa jenis barang, yaitu barang dan jasa, pakaian, serta barang tahan lama, masing-masing meningkat sebesar 6,69 persen, 4,84 persen, dan 43,87 persen. Secara keseluruhan, rata-rata pengeluaran untuk makanan pada tahun 2025 naik menjadi Rp681.924 per kapita sebulan, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp633.030, atau terjadi peningkatan sebesar 7,72 persen.



Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasuruan

Gambar 7.1 Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita Sebulan di Kabupaten Pasuruan, 2021 - 2025

Jika ditinjau menurut rata-rata pengeluaran penduduk perkapita sebulan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Rata-rata pengeluaran ini sudah mencakup pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Mulai tahun 2021 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan sebesar Rp967.469,- mengalami kenaikan menjadi Rp1.007.329,- (tahun 2022), mengalami peningkatan kembali pada tahun 2023 menjadi Rp1.137.058,- kemudian terus meningkat kembali di tahun 2024 menjadi sebesar Rp1.140.133,- dan pada 2025 mengalami peningkatan yang tipis menjadi Rp1.156.443,-. Dalam kurun waktu lima tahun terjadi peningkatan kurang lebih 19 persen jika dibandingkan kondisi rata-rata pengeluaran penduduk perkapita per bulan pada tahun 2021. Kenaikan rata-rata pengeluaran ini merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kenaikan taraf kesejahteraan hidup penduduk Kabupaten Pasuruan.

PERUMAHAN

97,53%

Rumah berlantaikan bukan tanah



91,71%

Rumah beratapkan
Beton/Genteng/Seng/Kayu/Sirap



99,45%

Rumah berdinding Tembok/
Plesteran Anyaman Bambu/Kawat/
Kayu/Papan/ Batang Kayu





basuruankab.bps.go.id

Bab 8 Perumahan

Salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia adalah tersedianya rumah tinggal. Selain merupakan kebutuhan yang mendasar, rumah tinggal juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah sebagai tempat tinggal juga mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja seseorang karena selain sebagai tempat tinggal atau hunian juga berfungsi sebagai tempat pusat pendidikan, pembinaan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Keadaan perumahan yang baik dapat menunjang usaha pembangunan ekonomi, karena dengan kualitas kehidupan yang layak melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Status sosial seseorang juga dapat ditunjukkan melalui kualitas atau kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Salah satu fasilitas perumahan yang dapat mencerminkan kesejahteraan adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan. Selain itu, juga memenuhi fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya

Kualitas Rumah Tinggal

Secara umum rumah tinggal yang dapat dikategorikan kedalam rumah yang layak huni jika memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal seperti memiliki lantai, dinding dan atap yang memenuhi syarat, serta mempunyai luas lantai yang mencukupi atau sebanding dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya, termasuk fasilitas penerangan, air minum dan tempat pembuangan akhir/tinja. Selain itu kualitas bangunan tempat tinggal dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi dari penghuninya. Rumah dengan bangunan yang kualitasnya baik tentunya kondisi ekonominya juga lebih baik dibandingkan mereka yang menempati rumah dengan kualitas bangunan yang rendah.

Tabel 8.1
 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Pasuruan, 2024-2025

Indikator Kualitas Perumahan	Tahun	
	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Lantai Bukan Tanah	97,33	97,53
Beton/Genteng/Seng/Kayu/Sirap	93,88	91,71
Tembok/ Plesteran Anyaman Bambu/Kawat/ Kayu/Papan/ Batang Kayu	99,40	99,45

Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasuruan, 2024-2025

Berdasarkan data Susenas 2025, persentase rumah tangga di Kabupaten Pasuruan yang berlantaikan bukan tanah menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2025, rumah yang berlantaikan bukan tanah naik menjadi sebesar 97,53 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 97,33 persen.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk menilai kualitas rumah tinggal adalah jenis atap dan dinding terluas yang digunakan. Pada tahun 2025, rumah tinggal di Kabupaten Pasuruan yang menggunakan atap beton, genteng, seng, dan asbes mencapai 91,71 persen. Persentase ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah telah menggunakan material atap yang tergolong layak dan cukup kuat. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2024, yaitu sebesar 93,88 persen, terlihat bahwa perubahan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya stabilitas dalam pemilihan material atap oleh masyarakat.

Pada tahun 2025, kualitas perumahan di Kabupaten Pasuruan jika dilihat dari indikator penggunaan dinding terluas meliputi tembok, plesteran, anyaman bambu, kawat, kayu, papan, maupun batang kayu mengalami sedikit perubahan dibandingkan dengan tahun 2024. Jenis dinding tersebut memberikan kontribusi sekitar 99,45 persen terhadap kondisi perumahan secara keseluruhan. Angka ini meningkat sebesar 0,05 poin persen dari tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat telah menggunakan material dinding yang relatif layak dan mendukung kualitas hunian.

Bila ditarik benang merah, kualitas perumahan di Kabupaten Pasuruan dapat dikatakan sudah baik. Hal ini terlihat dari berbagai indikator yang digunakan untuk menilai kualitas rumah tinggal, yang secara konsisten menunjukkan capaian di atas 90 persen. Semakin baiknya pelaksanaan program pemerintah mengenai Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) juga berperan sebagai katalisator penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program tersebut tidak hanya mendorong perbaikan fisik bangunan, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh penduduk.

Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal seperti ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari adalah air, sehingga ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan dikonsumsi dan sanitasi merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah

Air bersih adalah air yang layak untuk digunakan penduduk untuk kegiatan sehari-hari. Air minum bersih adalah air minum yang sumbernya berasal dari air kemasan, isi ulang, ledeng, sumur terlindung dan mata air terlindung. Pada tahun 2025, rumah tangga di Kabupaten Pasuruan yang menggunakan air minum bersih telah mencapai 100 persen, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 98,93 persen. Kondisi ini merupakan salah satu evaluasi kinerja pemerintah dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya air minum yang bersih bagi kesehatan tubuh dan juga ketersediaan air bersih di lingkungan sekitar untuk dikonsumsi masyarakat.

Fasilitas perumahan yang cukup penting peranannya dalam usaha sanitasi adalah penyediaan sarana jamban. Jika dilihat dari segi kesehatan lingkungan dan masyarakat, masalah pembuangan kotoran manusia dapat mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi pencemaran terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan kriteria jamban yang sehat. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2025, rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik mencapai 83,98 persen. Sedangkan rumah tangga yang mempunyai jamban sendiri sebesar 88,66 persen pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan perbaikan dibandingkan tahun 2024, dimana jamban dengan tangki septik sebesar 83,21 persen dan jamban sendiri sebesar 88,66 persen

Tabel 8.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Fasilitas Perumahan di Kabupaten Pasuruan, 2024-2025

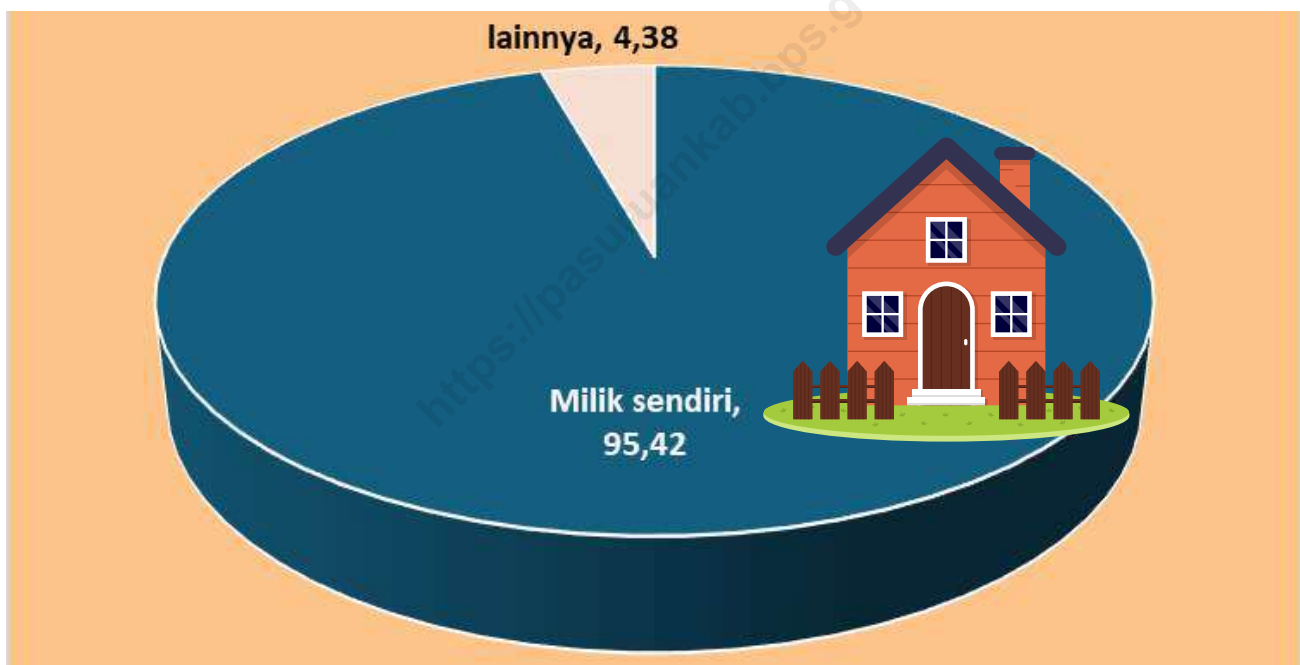
Indikator Kualitas Perumahan	2024	2025
(1)	(2)	
Air Kemasan, air isi ulang, ledeng, sumur bor/pompa, sumur & mata air terlindung/air hujan (untuk minum)	98,93	100
Air dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur & mata air terlindung/air hujan (mandi/cuci)	97,22	98,47
Jamban sendiri	88,66	87,66
Jamban dengan tangki septik	83,21	83,98
Sumber penerangan listrik PLN	100	100

Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasuruan, 2024-2025

Sumber penerangan merupakan salah satu fasilitas perumahan yang penting. Idealnya, sumber penerangan yang digunakan berasal dari listrik baik dari PLN maupun Non-PLN. Pengguna listrik PLN mencakup rumah tangga yang mempunyai meteran sendiri maupun yang menyalur dari tetangga. Bila dilihat dari penggunaan sumber penerangan, penduduk di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 telah menggunakan listrik sebagai penerangan utama. Sebesar 100 persen penduduk di Kabupaten Pasuruan menggunakan sumber penerangan listrik dari PLN. Artinya seluruh penduduk di wilayah Kabupaten Pasuruan telah menikmati listrik

Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Tingkat kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dilihat melalui salah satu indikatornya yaitu status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas, atau status rumah kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri akan lebih tenang dibandingkan mereka yang menempati rumah sewa apalagi yang bebas sewa karena telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.



Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasuruan, 2025

Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Pasuruan, 2025

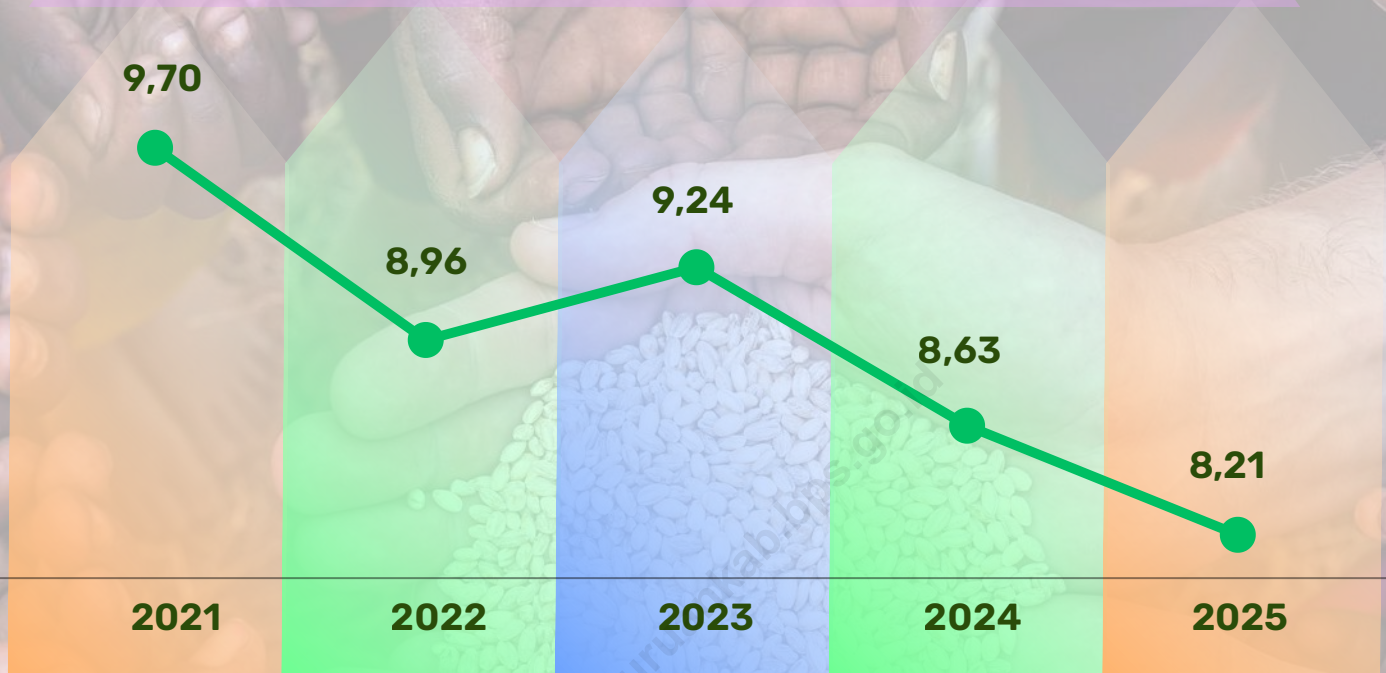
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Pasuruan menempati rumah milik sendiri. Persentasenya mencapai 95,42 persen, yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduk telah memiliki hunian secara permanen sebagai tempat tinggal. Kepemilikan rumah ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat, karena memiliki rumah sendiri umumnya mencerminkan stabilitas ekonomi dan keamanan tempat tinggal.

Sementara itu, sisanya sebesar 4,38 persen merupakan rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri, baik melalui sistem kontrak, sewa, numpang, maupun bentuk hunian sementara lainnya. Meskipun jumlahnya relatif kecil, kelompok ini tetap perlu mendapat perhatian, terutama terkait akses terhadap hunian layak dan terjangkau. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa tingkat kepemilikan rumah di Kabupaten Pasuruan tergolong sangat tinggi dan menjadi salah satu faktor pendukung kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin membaik.

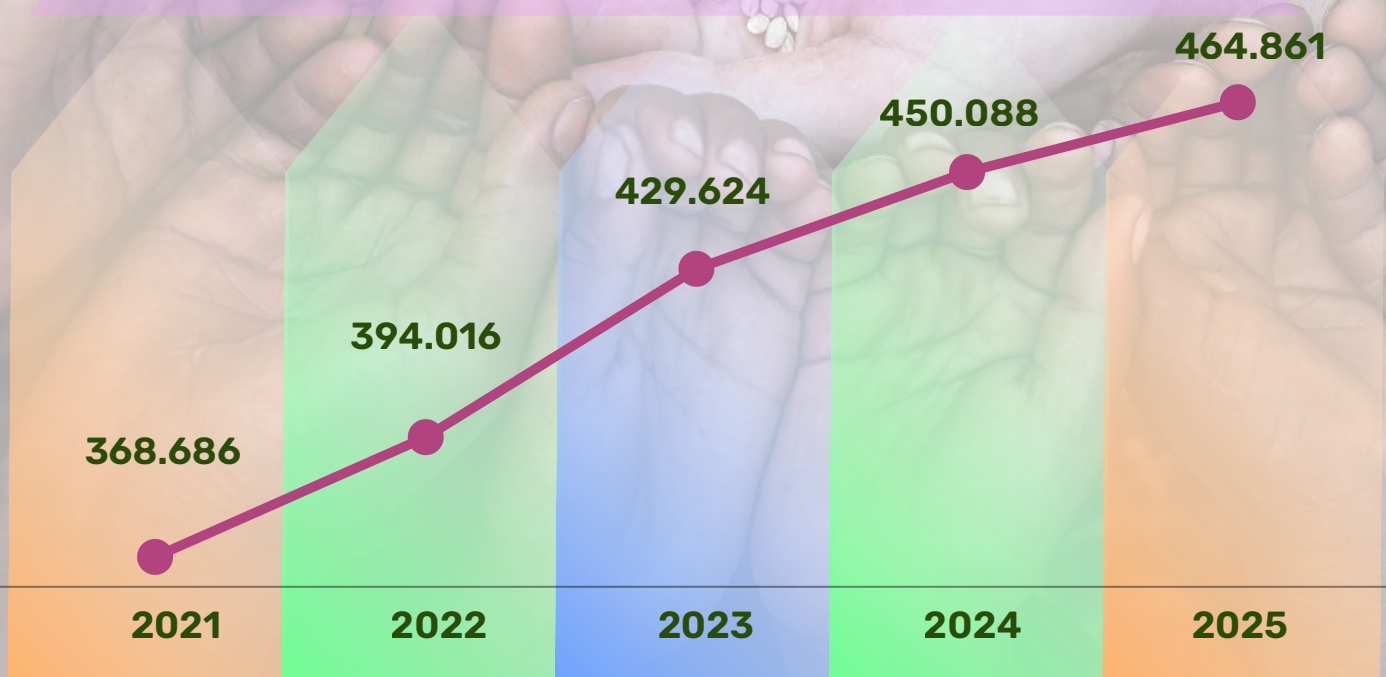
<https://pasuruankab.bps.go.id>

KEMISKINAN

**Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan,
2021 s.d. 2025 (persen)**



**Garis Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan,
2021 s.d. 2025 (rupiah)**





Bab 9 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh dunia saat ini dan menjadi fokus utama dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), terutama pada tujuan 1: mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk. Meski banyak kemajuan telah dicapai dalam beberapa dekade terakhir, jutaan orang di seluruh dunia masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan pendidikan, tetapi juga memengaruhi kesempatan seseorang untuk hidup dengan martabat dan kesempatan untuk berkembang.

Sebagai bagian dari agenda global untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera, mengentaskan kemiskinan merupakan langkah krusial dalam memastikan kesejahteraan bagi semua orang. TPB menekankan pentingnya pendekatan yang terintegrasi, di mana aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan saling berhubungan. Penghapusan kemiskinan juga berkaitan erat dengan tujuan TPB lainnya seperti mengurangi ketidaksetaraan (tujuan 10), memastikan akses pada pendidikan berkualitas (tujuan 4), serta kesehatan yang baik dan kesejahteraan (tujuan 3). Oleh karena itu, melalui upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita bisa mewujudkan masa depan dimana setiap individu memiliki kesempatan untuk hidup lebih sejahtera dan berkelanjutan.

BPS menggunakan konsep kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan makanan maupun bukan makanan dari sisi pengeluaran dalam menghitung kemiskinan. Seseorang dimasukkan kategori miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang diperoleh berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menggambarkan minimum nilai rupiah yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun bukan makanan.

Tabel 9.1

Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan, 2020-2025

Tahun	Jumlah Penduduk (ribu)	Penduduk Miskin (persen)
(1)	(2)	(3)
2020	151,43	9,26
2021	159,78	9,70
2022	148,62	8,96
2023	154,09	9,24
2024	144,84	8,63
2025	138,43	8,21

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Kabupaten Pasuruan 2025

Selama tahun 2020-2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan cukup fluktuatif namun trennya cenderung menurun seiring banyaknya program pengentasan kemiskinan yang digalakkan oleh pemerintah. Pada 2020 penduduk miskin Kabupaten Pasuruan sebesar 9,26 persen, namun terjadi peningkatan akibat dampak pandemi Covid-19, pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan menjadi 9,70 persen kemudian mengalami penurunan menjadi 8,96 persen pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena mulai memulihnya aktivitas ekonomi pasca pandemi Covid-19 serta bantuan pemerintah Kabupaten Pasuruan yang tepat sasaran. Pada tahun 2023 kemiskinan di Kabupaten Pasuruan kembali peningkatan menjadi 9,24 persen, yang disebabkan karena daya beli masyarakat menurun efek dari kenaikan beberapa komoditas bahan makanan termasuk BBM yang cukup tinggi. Seiring dengan berjalannya beberapa kebijakan untuk menanggulangi kenaikan harga, pada tahun 2024 kemiskinan Kabupaten Pasuruan kembali turun menjadi 8,63 persen. Selanjutnya, pada tahun 2025 angka kemiskinan menunjukkan penurunan lagi sebesar 0,42 persen menjadi 8,21 persen. Dengan kata lain, proporsi penduduk miskin berkurang, sehingga kondisi ekonomi masyarakat secara umum membaik dibanding tahun sebelumnya.

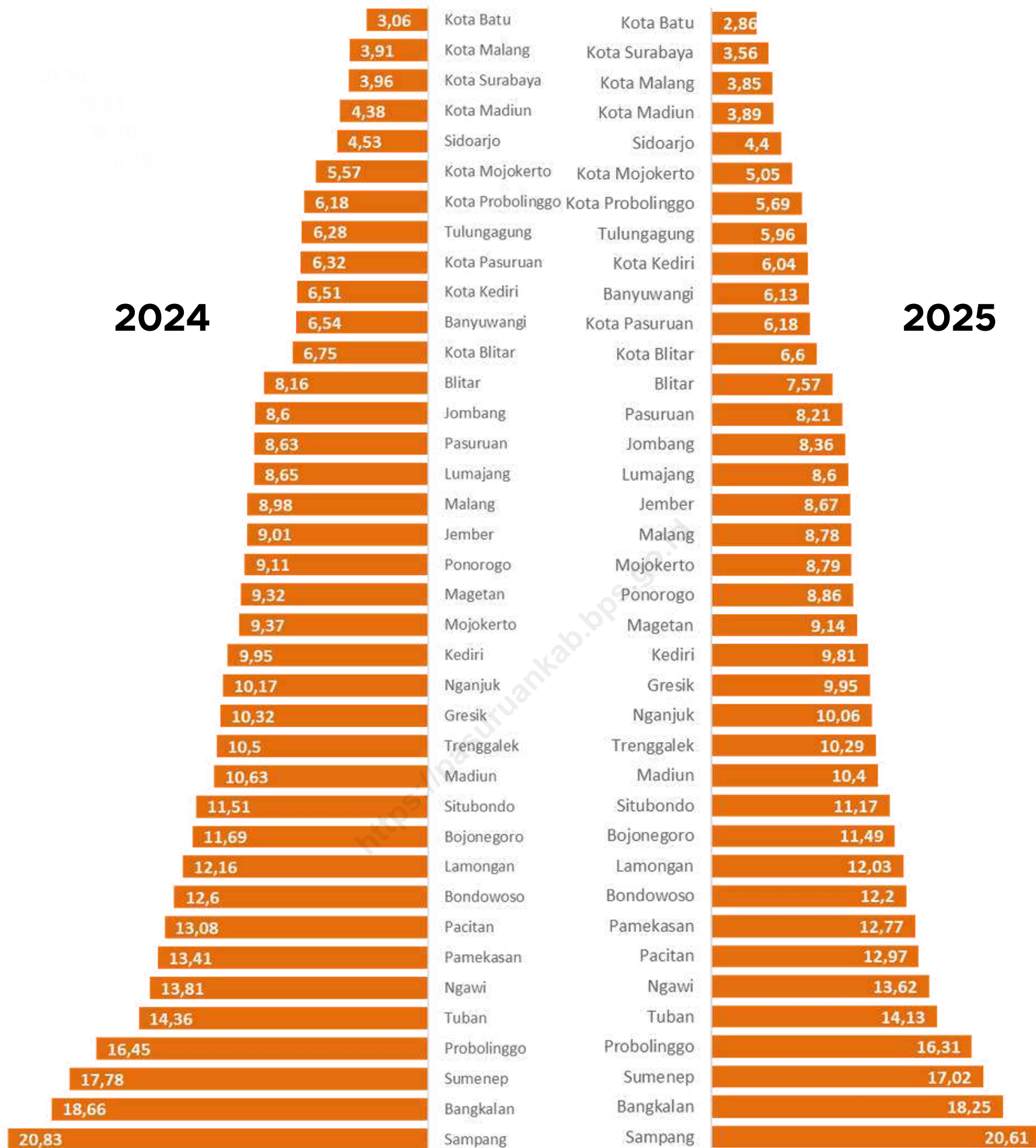
Perkembangan Penduduk Miskin di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota

Selama periode 2024 dan 2025 peringkat kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan persentase penduduk miskin tidak mengalami perubahan yang berarti, terdapat beberapa kabupaten yang peringkatnya bergeser, namun tidak ada yang bergesernya cukup signifikan. Beberapa kabupaten/kota saling bertukar tempat. Kota Kediri pada 2024 peringkat 29 dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,51 persen, pada tahun 2025 menempati peringkat 30 dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,04 persen, bertukar tempat dengan Kota Pasuruan dari 6,32 persen pada 2024 menjadi 6,18 persen pada 2025. Kabupaten Banyuwangi juga mengalami perubahan peringkat tahun 2024 peringkat 28 dengan persentase jumlah penduduk miskin dari 6,54 persen menjadi 6,13 persen atau peringkat 29 pada 2025. Dan, beberapa kabupaten/kota juga mengalami kenaikan peringkat yaitu Kabupaten Pasuruan, Jember, kabupaten Mojokerto, Gresik dan Pamekasan berturut-turut peringkat 24, 21, 18, 15 dan 7 pada tahun 2024 menjadi peringkat 25, 22, 20, 16, dan 8 pada tahun 2025

Kabupaten di wilayah Madura memiliki persentase penduduk miskin lebih besar dibanding daerah lain, dimana peringkat 1 sampai dengan 3 adalah kabupaten-kabupaten di wilayah Madura (Sampang, Bangkalan dan sumenep). Pada tahun 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sampang mencapai 20,61 persen, nilai ini merupakan yang terbesar di Jawa Timur, diikuti Kabupaten Bangkalan 18,25 persen, Kabupaten Sumenep 17,02 persen. Persentase penduduk miskin terendah di Madura adalah di Kabupaten Pamekasan yaitu 12,77 persen atau menempati urutan ke-8. Sementara peringkat ke-4 sampai dengan ke-6 berturut-turut adalah sebagai berikut: Kabupaten Probolinggo 16,31 persen; Kabupaten Tuban 14,31 persen dan Kabupaten Ngawi 13,62 persen.

2024

2025



Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jawa Timur, 2024-2025

Gambar 9.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2024-2025

Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Garis Kemiskinan merupakan batas yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penghitungan garis kemiskinan dilakukan terpisah antara daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan antar waktu selama 2020 - 2025.

Tabel 9.2

Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pasuruan, 2020-2025

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	355.299	1,15	0,23
2021	368.686	1,17	0,24
2022	394.016	1,29	0,29
2023	429.624	1,22	0,26
2024	450.088	1,09	0,21
2025	464.861	0,80	0,15

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Kabupaten Pasuruan 2025

Garis kemiskinan Kabupaten Pasuruan pada 2020 sebesar Rp 355.299,00. Besarnya garis kemiskinan Kabupaten Pasuruan pada tahun berikutnya naik 3,77 persen menjadi Rp 368.686,00 pada tahun 2021. Kemudian dari tahun 2021 ke 2022, garis kemiskinan Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan sekitar Rp 25.330,00, yaitu sebesar Rp 368.686,00 menjadi Rp 394.016,00. Garis kemiskinan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 sebesar Rp 429.624,00, lebih besar Rp 35.608,00 dari garis kemiskinan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, garis kemiskinan Kabupaten Pasuruan Rp 450.088,00, mengalami peningkatan 4,76 persen, lebih besar Rp 20.464,00 dari garis kemiskinan tahun 2023. Kemudian, naik lagi pada tahun 2025 menjadi Rp 464.861,00

Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam implementasi kebijakannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemiskinan bukan hanya persoalan banyaknya penduduk miskin, tetapi juga seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut sebagai P1, dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin (P2).

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Pasuruan mencapai 1,15 pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan 0,02 poin menjadi 1,17. Pada tahun 2022, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Pasuruan naik 0,12 poin menjadi sebesar 1,29. Pada tahun 2023 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Pasuruan kembali mengalami penurunan sebesar 0,07 poin dari tahun sebelumnya, menjadi 1,22.

Pada tahun 2024, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan 0,13 poin dari tahun sebelumnya, menjadi sebesar 1,09. Berlanjut kembali, pada tahun 2025 konsisten mengalami penurunan menjadi sebesar 0,80. Penurunan P1 ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mendekat. Dengan kata lain kedalaman kemiskinan penduduk Kabupaten Pasuruan berkurang.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Pasuruan memiliki pola yang serupa dengan indeks kedalaman kemiskinan (P1) antar waktu. Pada tahun 2020 nilai Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Pasuruan sebesar 0,23. Pada tahun 2021 nilai Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Pasuruan menjadi 0,24 atau naik 0,01 poin dari tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022 naik kembali sebesar 0,05 poin, nilai Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Pasuruan 0,29. Pada tahun 2023 Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Pasuruan turun 0,03 poin dari tahun sebelumnya, menjadi 0,26. Pada tahun 2024, Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Pasuruan turun 0,04 poin dari tahun sebelumnya, menjadi sebesar 0,21. Begitu juga pada tahun 2025, menjadi sebesar 0,15. Penurunan nilai P2 menandakan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin semakin menurun.

Berdasarkan hal ini diperoleh dua informasi. Pertama, biaya yang diperlukan dalam upaya pengurangan kemiskinan, terutama yang bersifat *cash transfer* agar penduduk keluar dari Garis Kemiskinan tidak sebesar tahun 2020 (berdasarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1) dan tidak memerlukan banyak variasi program dikarenakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasuruan relatif homogen dibandingkan kondisi tahun 2020 (berdasarkan Indeks Keparahkan Kemiskinan/P2).

SOSIAL LAINNYA

69,14%

Penduduk 5 tahun ke atas menggunakan internet

25,05%

Rumah tangga menerima Program BPNT/Program Sembako



Bab 10 Sosial Lainnya

Pada bagian sosial lainnya ini, lebih banyak mengupas mengenai akses teknologi informasi dan komunikasi, penerima kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis. Dua hal tersebut juga sebagai tolak ukur melihat sampai sejauh mana kesejahteraan masyarakat.

Persentase Penduduk yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi

Salah satu indikator tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat bisa diketahui dari mempunyai penguasaan/kepemilikan akses teknologi informasi dan komunikasi. Di abad ke 20 ini, kemajuan teknologi informasi berkembang cepat. Penggunaan telepon rumah sudah bergeser ke telepon seluler atau lebih mudah disebut *handphone* (HP). Bagi masyarakat, HP lebih praktis dan ekonomis dibanding telepon. Memiliki HP tidak memerlukan biaya pemasangan dan tidak tergantung adanya sarana kabel telepon. Cukup dengan tower signal, penggunaan HP bisa dilakukan dimana saja. Di samping itu, pembelian pulsa HP bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing individu. Bahkan hanya dengan perangkat HP, siapapun bisa melakukan akses internet dengan tujuan yang lebih luas.

Tabel 10.1

Persentase Penduduk 5 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi di Kabupaten Pasuruan (Persen), 2024 - 2025

Penggunaan Teknologi dan Informasi	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Ponsel/Komputer	67,69	71,65
Penggunaan Internet	64,93	69,14

Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab Pasuruan, 2025

Masyarakat Kabupaten Pasuruan semakin melek teknologi informasi, terlihat pada tabel 10.1 dominasi penggunaan ponsel/komputer pada penduduk usia 5 tahun keatas tahun 2025 diatas 50 persen yaitu 71,65 persen. Dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan sebesar 3,96 poin persen. Perkembangan TIK telah mengubah dinamika global. Beragam tantangan dan peluang muncul dengan hadirnya TIK di tengah masyarakat. Aksesibilitas masih menjadi tantangan utama teknologi. Penyediaan perangkat teknologi, infrastruktur, dan jaringan internet yang mahal dan belum merata menyebabkan belum semua lapisan masyarakat mampu mengakses teknologi.

Padahal, penggunaan teknologi dan internet mampu mendorong peningkatan taraf hidup penduduk dengan semakin banyak peluang usaha dan ekonomi yang tercipta.

Sementara itu, dari seluruh penduduk di Kabupaten Pasuruan, yang menggunakan ponsel/komputer untuk mengakses internet tercatat sebesar 69,14 persen. Pengguna internet semakin meningkat seiring kebutuhan akses informasi yang cepat dan mudah, serta ketersediaan infrastruktur pendukung yang semakin meluas. Dengan menjamurnya penyedia jasa internet/provider yang cukup bersaing dalam segi harga ataupun kecepatan akses internet, semakin mendorong penggunaan internet di kalangan masyarakat. Tidak hanya itu, jasa internet/provider tersebut juga membuka jaringan internet menjangkau daerah yang sulit menerima sinyal handphone. Peningkatan penggunaan internet naik sebesar 4,24 persen dibandingkan tahun 2024. Internet dapat dimanfaatkan untuk mendapat informasi/ berita, berkomunikasi, transaksi jual/beli, akses finansial, pembelajaran atau bekerja online, hiburan, dan lainnya. Dengan demikian, internet menjadi solusi untuk menembus keterbatasan ruang dan waktu yang menjadi kelemahan dari metode konvensional.

Ekonomi bertransformasi menuju modernisasi dan digitalisasi. Indonesia perlu mengerahkan segala potensi yang ada agar mampu bersaing dalam tataran global. Pendidikan dan pelatihan menjadi investasi untuk menyiapkan generasi yang berkompeten, unggul, dan berdaya saing sebagai motor kemajuan pembangunan di masa depan. Regulasi dan kebijakan hendaknya disusun dengan mempertimbangkan aspek keterjangkauan dan pemerataan. Artinya, kebijakan menyasar seluruh lapisan masyarakat terutama penduduk miskin, rentan, dan marjinal yang sulit menjangkau akses kebutuhan dasar. Pemerataan berarti pembangunan inklusif ditujukan agar setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses TIK di mana pun berada. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya dirasakan oleh segelintir kelompok saja, tetapi juga dinikmati seluruh penduduk

Persentase Penduduk Penerima Kredit Usaha

Ketika rumah tangga membutuhkan dana tambahan untuk beragam keperluan, layanan keuangan dibutuhkan sebagai sumber pembiayaan. Layanan keuangan disediakan oleh lembaga formal maupun nonformal, serta dapat pula bersumber dari perseorangan. Untuk meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, banyak tersedia kredit usaha dari Pemerintah dan Swasta. Bahkan untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah, Pemerintah mengeluarkan program kredit usaha rakyat (KUR) dengan prosedur yang mudah dan bunga yang relatif murah. Terkait kredit usaha rakyat, tidak sedikit masyarakat yang masih minim pengetahuannya tentang kredit usaha. Akibatnya, di antaranya terjebak pada rentenir dan sistem ijon. Sosialisasi KUR juga dirasakan minim. Hal ini menyebabkan rumah tangga yang memanfaatkan kredit usaha tidak begitu banyak.

Anggota Rumah tangga di Kabupaten Pasuruan yang menerima kredit usaha (KUR) dari bank pada tahun 2025, sebesar 2,04 persen, sedangkan program bank selain KUR sebesar 4,85 persen. Kemudian, untuk kredit lainnya sebesar 2,41 persen. Hal ini, mencerminkan, mayoritas masyarakat lebih menggunakan kredit untuk konsumtif daripada untuk usaha. Dari 100 rumah tangga, sekitar 5 rumah tangga yang menerima kredit jenis ini.

Tabel 10.2

Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha Menurut Jenis Kredit Usaha di Kabupaten Pasuruan (persen), 2025

Jenis Kredit Usaha	2025
(1)	(2)
KUR dari Bank	2,04
Program Bank Selain KUR	4,85
Kredit lainnya	2,41

Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasuruan, 2025

Semakin banyak masyarakat yang mengakses layanan kredit terutama dari lembaga keuangan mencerminkan inklusi keuangan yang semakin baik. Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 31/SEOJK.07/2017). Kredit yang diterima rumah tangga umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif. Sehingga, akses kredit dapat menjadi salah satu gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan kredit investasi dan kredit konsumsi berpengaruh positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Dwiastuti, 2020). Semakin banyak rumah tangga yang menerima dan memanfaatkan kredit terutama yang bersifat produktif diharapkan menjadi cerminan pertumbuhan usaha yang semakin baik. Sementara itu, semakin banyak kredit konsumtif yang diterima masyarakat diharapkan dapat menjadi cermin tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin naik pula.

Persentase Penerima Perlindungan Sosial

Untuk menjaga daya beli rumah tangga miskin dan rentan, pemerintah menggulirkan beberapa jenis bantuan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). BPNT atau bantuan sembako diberikan pemerintah setiap bulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan harapan dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari. Persentase rumah tangga yang menerima BPNT atau bantuan sembako menunjukkan kenaikan (Tabel 10.3). Penduduk miskin dan rentan memiliki keterbatasan dalam mengakses makanan secara cukup dan bergizi. Oleh sebab itu, kehadiran bantuan pangan ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kesejahteraan sosial mereka. Data pada Tabel 10.3 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga penerima PKH mengalami penurunan, berbeda seperti tren pada bantuan pangan. Meskipun terjadi penurunan penerima, prinsipnya adalah semakin banyak bantuan sosial yang disalurkan, semakin besar pula harapan bahwa rumah tangga miskin dapat terbantu untuk memperbaiki taraf hidupnya. Penurunan persentase ini bisa berarti beberapa hal, misalnya adanya perbaikan kondisi ekonomi sebagian rumah tangga sehingga tidak lagi memenuhi syarat penerima, atau perubahan kebijakan penyaluran.

Tabel 10.3

Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima di Kabupaten Pasuruan (Persen), 2024-2025

Jaminan Kesehatan	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Program BPNT/Program sembako	21,94	25,05
Program Keluarga Harapan (PKH)	20,16	15,23

Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab Pasuruan, 2025

Perlindungan sosial memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat miskin. Hal ini menjadi semakin krusial ketika terjadi kenaikan harga pangan global, yang menyebabkan harga pangan dan kebutuhan dasar di dalam negeri ikut meningkat. Tanpa perlindungan sosial yang memadai, kelompok miskin akan semakin rentan karena pendapatan mereka tidak mampu mengikuti kenaikan biaya hidup.

<https://pasuruankab.bps.go.id>

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. (2025). *Kabupaten Pasuruan Dalam Angka Tahun 2025*. Pasuruan : BPS Kabupaten Pasuruan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. (2025). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasuruan Tahun 2025*. Pasuruan : BPS Kabupaten Pasuruan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. (2025). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasuruan Tahun 2025*. Pasuruan : BPS Kabupaten Pasuruan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. (2025). *Profil Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Maret 2025*. Pasuruan : BPS Kabupaten Pasuruan

Badan Pusat Statistik . (2024). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024*. Jakarta : BPS RI

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2023). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023*. Surabaya : BPS Provinsi Jawa Timur

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2024). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024*. Surabaya : BPS Provinsi Jawa Timur

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025*. Surabaya : BPS Provinsi Jawa Timur

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Sultan Agung No. 42, Pasuruan, 67117
Telp. (0343) 423420, Email: bps3514@bps.go.id
Website: <https://pasuruankab.bps.go.id>

